

# EVALUASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KECAMATAN MAJASARI KABUPATEN PANDEGLANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh

AAT QODRAT

NIM 6661101859

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
SERANG, 2017**

## **ABSTRAK**

**Aat Qodrat. 6661101859. Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I, Dr. Ayuning Budiati, MPPM, Pembimbing 2, Deden M. Haris, M.si.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. Peneliti menggunakan teori kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003:610) yang terdiri dari Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil temuan lapangan peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang belum optimal. Pada dimensi efektifitas, pencapaian target peningkatan kualitas hidup masyarakat masih belum tercapai karena dari segi pemilihan kelompok KUBE tidak di pilih berdasarkan kebutuhan dan kriteria yang telah ditentukan. Pada dimensi efisiensi, usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan program KUBE sudah dilakukan mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat pengawasan dari Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, pada dimensi kecukupan sumber dana yang dikeluarkan sudah mencukupi kebutuhan kelompok penerima bantuan, pada dimensi Perataan manfaat dari program KUBE sudah bisa dirasakan merata oleh setiap anggota penerima bantuan, pada dimensi Responsivitas masyarakat menerima dengan sangat senang hati terhadap adanya program KUBE ini dan pada dimensi terakhir yakni Ketepatan, program KUBE merupakan suatu kebijakan tepat yang dikeluarkan oleh pemerintah karena dengan program ini pemerintah memberi jalan supaya masyarakat bisa lebih hidup mandiri.

**Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Kelompok Usaha Bersama**

## **ABSTRACT**

**Business Group Program (KUBE) Evaluation in the District of Majasari, Pandeglang Regency. Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences. Supervisor I, Dr. Ayuning Budiati, MPPM, Supervisor II, Deden M. Haris, M.si.**

This study aims to evaluate the Joint Business Group Program (KUBE) in Majasari District Pandeglang District. Researchers use the theory of Policy Evaluation Criteria According to William N. Dunn (2003: 610) consisting of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness, and Accuracy. The research method used is descriptive method with qualitative approach. The results of field findings concluded that the implementation of the Joint Business Group Program (KUBE) in Kecamatan Majasari Pandeglang District has not been optimal. In the dimension of effectiveness, the achievement of the target of improving the quality of life of the community has not been achieved because in terms of the election of KUBE groups are not chosen based on the needs and criteria that have been determined. In the efficiency dimension, the effort to develop and improve the KUBE program has been done from the village level to the level of supervision from the Pandeglang District Social Service, the dimension of sufficient funding source is sufficient to meet the needs of the beneficiary group, on the dimension of Benefits of KUBE program can be felt Distributed by each beneficiary member, on the dimension of the responsiveness of the community received with great pleasure in the existence of this KUBE program and in the last dimension that is Accuracy, KUBE program is a right policy issued by the government because with this program the government gives way so that society can live more Independent.

**Keywords: Policy Evaluation, Business Group Program.**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Aat Qodrat

NIM : 6661101859

Tempat tanggal lahir : Pandeglang, 29 Agustus 1992

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul EVALUASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KECAMATAN MAJASARI KABUPATEN PANDEGLANG adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Juli 2017



Aat Qodrat

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Nama : Aat Qodrat**

**NIM : 6661101859**

**Judul Skripsi : EVALUASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA  
(KUBE) DI KECAMATAN MAJASARI  
KABUPATEN PANDEGLANG.**

**Serang, Juli 2017**

**Skripsi Ini Telah Disetujui untuk Disajikan**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Avuning Budiati, MPPM**

**NIP. 196905022005012001**



**Deden M. Haris, M.si**

**NIP. 197204072008121002**

**Mengetahui,**

**Dekan FISIP UNTIRTA**



**Dr. Agus Sjafari, M.Si**

**NIP. 197108242005011002**



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : AAT QODRAT  
NIM : 6661101859  
Judul Skripsi : EVALUASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA  
(KUBE) DI KECAMATAN MAJASARI KABUPATEN  
PANDEGLANG

Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 02  
Agustus 2017 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 02 Agustus 2017

Ketua Penguji :  
(Drs. Hasuri Waseh, M.Si)  
NIP. 197011252005012001

Anggota :  
(Yeni Widvastuti, S.Sos., M.Si)  
NIP. 197905252005012001

Anggota :  
(Listyaningsih, S.Sos., M.Si)  
NIP. 198101122008121001



Handwritten signatures of the examiners, including the Chairman and two members, with dotted lines indicating the signature lines.

Mengetahui,

Dekan Fisip Untirta  
  
Dr. Agus Sjafar, S.Sos., M.Si  
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara  
  
Listyaningsih, S.Sos., M.Si  
NIP. 197603292003122001

*Tiada do'a yang lebih indah  
selain do'a agar skripsi ini cepat selesai  
(Penulis)*

*Skripsi ini kupersembahkan  
:  
Untuk Abah dan Almh. Ibu  
Dan Seluruh Keluarga  
beserta Sahabat Tercinta*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang maha penyayang dan pengasih, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik teknik penyusunan maupun materi yang disajikan, mengingat begitu terbatasnya kemampuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu saran dan kritik yang dapat membangun, dengan berjiwa besar peneliti akan terima dengan baik sebagai bahan perbaikan untuk menambah wawasan di masa yang akan datang.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, pengarahan serta do'a yang sangat berharga dari semua pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih tulus dan ikhlas kepada :

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus sjafari, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si, Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



4. Mia Dwiana Widyaningtyas, M.Kom, Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Gandung Ismnato, S.Sos, M.M, Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Listyaningsih S.Sos. M.Si, Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Ipah Ema Jumiati S.Sos, M.Si Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Dr. Ayuning Budiati, S.Ip, MPPM Pembimbing I Skripsi yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat bagi penulis dalam setiap tahapan bimbingan yang telah dilakukan.
9. Deden M. Haris, S.Sos, M.Si Pembimbing II skripsi yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat bagi penulis dalam setiap tahapan bimbingan yang telah dilakukan.
10. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
11. TB. Syarifudin. D, S.Sos Camat Kecamatan Majasari yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penelitian ini.
12. Pembimbing KUBE Kecamatan dan Pembimbing KUBE Kelurahan yang telah sabar dan baik hati memberikan informasi mengenai program KUBE di Kecamatan Majasari.

13. Ketua dan Anggota KUBE Kelurahan Cilaja dan Kelurahan Pager Batu yang telah memberikan berbagai informasi yang peneliti butuhkan.
14. Kedua orang tuaku tercinta dengan kesabaran serta penuh perhatiannya memberikan dorongan dan inspirasi berupa moril maupun materilnya.
15. Teman-teman seperjuangan BEGLEITER selama kita menuntut ilmu terimakasih atas kenangan selama perkuliahan.
16. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat menambah wawasan yang telah ada kepada kita semua, sehingga dapat dijadikan sebagai bekal kehidupan kita. Tegur sapa dan kritik dari berbagai pihak yang telah membaca skripsi ini penulis nantikan dengan terbuka.

Serang, Juli 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	11
1.3 Pembatasan Masalah .....	11
1.4 Rumusan Masalah .....	11
1.5 Tujuan Penelitian .....	12
1.6 Manfaat Penelitian .....	12
1.7 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II DESKRIPSI TEORI .....</b>	<b>18</b>
2.1 Deskripsi Teori.....	18
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	18
2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik .....	20
2.1.3 Teori Evaluasi Kebijakan Publik .....	28

2.1.4 Deskripsi Program KUBE.....	36
2.1.5 Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan KUBE.....	37
Pengertian KUBE.....	37
Dasar Hukum Pembentukan KUBE.....	38
Tujuan dan Sasaran KUBE .....	39
Proses Pembentukan KUBE .....	40
Organisasi dan Manajemen KUBE.....	41
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi KUBE .....	42
2.2 Penelitian Terdahulu .....	43
2.3 Kerangka Berfikir.....	44
2.4 Asumsi Dasar .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
3.1 Desain Penelitian .....	48
3.2 Instrumen Penelitian .....	50
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	51
3.4 Penentuan Informan .....	58
3.5 Teknik Analisis Data .....	61

3.6 Teknik Keabsahan Data .....	64
3.7 Waktu dan Tempat Penelitian .....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>72</b>
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian .....	72
4.2 Deskripsi Data Penelitian .....	83
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian .....	86
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian .....	107
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>115</b>
5.1 Kesimpulan .....	115
5.2 Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Kelompok KUBE Kelurahan Cilaja .....	8
Tabel 1.2 Kelompok KUBE Kelurahan Pager Batu .....	8
Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi Kebijakan .....	32
Tabel 3.1 Definisi Operasional Penelitian .....	54
Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian .....	57
Tabel 3.3 Pedoman Wawancara .....	61
Tabel 3.4 Jadwal Kegiatan Penelitian .....	70
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kelurahan di Kec. Majasari .....	72
Tabel 4.2 Batas Wilayah Kelurahan di Kec. Majasari .....	72
Tabel Lanjutan 4.2 Batas Wilayah Kelurahan di Kec. Majasari .....	72
Tabel 4.3 Nama-nama KUBE di Kec. Majasari .....	82
Tabel 4.4 Daftar Informan Penelitian .....	85
Tabel 4.5 Pembahasan dan Temuan di Lapangan .....	113



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Penelitian

Lampiran 2 Member Check

Lampiran 3 Matriks Hasil Wawancara

Lampiran 4 Daftar Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan hak dasar manusia sehingga harus menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial dapat terlaksana dengan baik dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga sosial dan pihak partisipan lainnya. Pemerintah memandang perlu memberdayakan lembaga sosial lainnya agar dapat menjadi mitra pemerintah dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. Pemberdayaan merupakan upaya penguatan pribadi, antar pribadi dan organisasi, sehingga yang bersangkutan memiliki kemampuan dan keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, dapat menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka serta dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan juga dapat dianggap sebagai rangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus, ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dapat juga dikatakan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Berbicara masalah kemiskinan atau tepatnya penduduk miskin seolah tidak pernah ada habisnya. Penduduk miskin nampaknya sudah menjadi ciri khas atau *trade mark* bagi negara miskin dan berkembang atau lebih dikenal sebagai negara dunia ketiga, dimana Indonesia termasuk salah satu diantaranya. Kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia pada umumnya mengarah pada kemiskinan absolut, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk mencapai standar hidup minimal

tertentu yang telah ditetapkan, walaupun pemerintah telah banyak menggulirkan berbagai program yang menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan, namun masih ada beberapa yang dianggap belum tepat sasaran, bahkan gagal dalam mengentaskan kemiskinan. Beberapa program dianggap belum menyentuh masalah mendasar yang terjadi pada masyarakat sehingga hasilnya tidak efektif. Selain itu, program yang ada juga dinilai masih bersifat reaktif, jangka pendek dan parsial.

Usaha kesejahteraan sosial merupakan usaha terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Usaha kesejahteraan itu sendiri, pada dasarnya merupakan suatu program ataupun kegiatan yang didesain secara kongkrit untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf hidup masyarakat. Usaha kesejahteraan dapat ditujukan pada individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam komunitas ataupun komunitas secara keseluruhan.

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mencantumkan kewajiban dan hak-hak dasar manusia dalam menikmati sistem jaminan dan perlindungan sosial serta memberikan akses kepada masyarakat terhadap potensi dan sumber kesejahteraan yang ada. Kebijakan nasional yang digulirkan oleh pemerintah dalam

menanggulangi masalah kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat antara lain adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan lain sebagainya. PNPM-Mandiri dengan *leading* sektornya adalah Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan PEMP dengan *leading* sektor adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan sedangkan PKH dan KUBE sebagai *leading* sektornya adalah Departemen Sosial RI.

PNPM-Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Sedangkan program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) adalah program pemberdayaan masyarakat miskin yang digulirkan oleh pemerintah melalui Departemen Sosial dalam bentuk usaha ekonomi produktif dengan menggunakan pendekatan kelompok, dengan sasaran untuk meningkatkan usaha kelompok produktif, menyediakan sebagian kebutuhan yang diperlukan bagi keluarga tidak mampu, menciptakan keharmonisan hubungan sosial antar warga, menyelesaikan masalah sosial yang dirasakan keluarga tidak mampu, pengembangan diri dan sebagai wadah berbagi pengalaman antar anggota. Pendekatan melalui KUBE ini merupakan identitas Departemen Sosial dalam penanggulangan kemiskinan.

Program pemberdayaan masyarakat miskin yang menjadi fokus kajian penulis dalam hal ini adalah program pemberdayaan sosial masyarakat miskin melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Berdasarkan pedoman umum pelaksanaan program pemberdayaan sosial Departemen Sosial RI Tahun 2009, pemberdayaan sosial masyarakat miskin dilakukan melalui pendekatan KUBE dengan alasan :

*Pertama*, dengan sistem KUBE kegiatan usaha yang tadinya dilakukan secara sendiri-sendiri kemudian dikembangkan dalam kelompok, sehingga akan memudahkan dalam pembinaan dan monitoring serta pembinaannya akan lebih efektif dan efisien baik dari segi biaya, tenaga, dan waktu yang digunakan. *Kedua*, dengan pembinaan melalui KUBE diharapkan kelompok ini akan saling membantu satu sama lain antara yang lemah dengan yang lebih mampu, baik dalam kemampuan, keterampilan, modal dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan KUBE. *Ketiga*, diharapkan dengan KUBE dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, rasa kepedulian, dan kesetiakawanan sosial, baik antar warga binaan sosial maupun kepada masyarakat secara luas karena mereka hidup dalam kelompok dan *Keempat*, KUBE dapat berfungsi menggerakkan keswadayaan, menguatkan dan mengembangkan usaha anggota, wadah pembinaan sosial, ekonomi dan budaya. (*Departemen Sosial RI Tahun 2009*)

Pelaksanaan program KUBE sebagai salah satu instrumen dari program pemberdayaan sosial masyarakat miskin yang memang sudah berjalan sejak tahun 1980-an. KUBE ini merupakan kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang



dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan program kesejahteraan sosial untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial mereka (*Depsos RI, 2009*).

Ada beberapa hal yang signifikan dari KUBE dalam program pemberdayaan sosial masyarakat miskin bukan semata-mata untuk perubahan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka tetapi juga untuk kehidupan sosialnya. Sebagai contoh dengan KUBE banyak orang yang mengungkapkan persoalan anggota KUBE di depan orang banyak, orang yang biasanya malu, tapi kalau sudah terbiasa dengan kelompok, akhirnya mereka saling percaya sehingga saling mengungkapkan diri bahkan anggota KUBE juga dapat menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Program KUBE merupakan komitmen nasional yang harus dilaksanakan dengan baik dan harus langsung menyentuh dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat miskin, mendorong tanggungjawab sosial bersama serta dapat menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat terhadap perhatian pemerintah kepada masyarakat miskin. (*Departemen Sosial RI Tahun 2009*)

Program KUBE mampu menjadi media yang meningkatkan kemampuan berkomunikasi, menyelesaikan masalah-masalah personal dan kelompok secara timbal balik, sehingga pada akhirnya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan mereka. Secara ekonomi, aktivitas usaha yang dilakukan dalam kelompok memberi kekuatan untuk mengembangkan usaha, menghimpun kekuatan modal, kemampuan bersaing, membangun jejaring usaha, membuka

peluang mengakses sumber-sumber ekonomi dan menciptakan kegiatan ekonomi yang demokratis.

Program KUBE dalam konteks pembangunan sosial, merupakan suatu perangkat, mekanisme dan sistem yang diarahkan untuk mencapai tujuan sosial, tujuan sosial dalam hal ini adalah memecahkan masalah sosial yang mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan terhadap suatu kondisi yang tidak diharapkan yaitu masalah kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan sosial yang menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya (*Depsos, 2009*).

Pada tahun 2014 di Kabupaten Pandeglang terdapat 186 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Pandeglang, salah satu daerah yang menerima bantuan program Kelompok Usaha Bersama ini yaitu Kecamatan Majasari dengan jumlah Kelompok Usaha Bersama sebanyak 10 kelompok yang terbagi didua kelurahan (*Disnakertransos Kab. Pandeglang*).

Kelurahan Cilaja dan Kelurahan Pager Batu merupakan 2 (dua) Kelurahan di Kecamatan Majasari yang mendapatkan program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan komposisi 5 (lima) kelompok KUBE di Kelurahan Cilaja dan 5 (lima) kelompok KUBE di Kelurahan Pager Batu.

**Tabel 1**  
**Nama Kelompok KUBE di Kelurahan Cilaja**  
**Kec. Majasari**

<b>No</b>	<b>Nama KUBE</b>	<b>Alamat KUBE</b>	<b>Jenis Usaha</b>
1	Rukun Mandiri 1	Kp. Soreah RT.02 RW.05	Makanan Ranging
2	Rukun Mandiri 2	Kp. Soreah RT.02 RW.05	Ternak Kambing
3	Rukun Mandiri 3	Kp. Cengkel RT. 02 RW.04	Pertanian
4	Rukun Mandiri 4	Kp. Pasir Bunut RT.06 RW.04	Ternak Kambing
5	Rukun Mandiri 5	Kp. Cibeunying RT.02 RW03	Ternak Ayam Kampung

*Sumber: Pemerintah Kecamatan Majasari 2015.*

Tabel diatas menunjukkan nama-nama kelompok usaha bersama (KUBE) di Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang adapun jumlah kelompok yaitu 5 (lima) kelompok masyarakat penerima bantuan.

**Tabel 1.2**  
**Nama Kelompok KUBE di Kelurahan Pager Batu**  
**Kec. Majasari**

<b>No</b>	<b>Nama KUBE</b>	<b>Alamat KUBE</b>	<b>Jenis Usaha</b>
1	Campurak 1	Kp. Campuraksanta RT.03 RW.07	Ternak Kambing
2	Gunung Nyekclek	Kp. Selagunung RT.01 RW.07	Makanan Ringan dan Ranging
3	Kadu Cagak	Kp. Paku Haji Cagak RT.02 RW.05	Ternak Kambing
4	Bina Tani	Kp. Campuraksanta RT.03 RW.07	Ternak Kambing
5	Limus Harapan	Kp. Paku Haji Girang RT.03 RW.0	Ternak Kambing

*Sumber: Pemerintah Kecamatan Majasari 2015.*

Tabel diatas menunjukkan nama-nama kelompok usaha bersama (KUBE) di Kelurahan Pager Batu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang adapun jumlah kelompok yaitu 5 (lima) kelompok masyarakat penerima bantuan.

Dengan dana bantuan modal sebesar 20 Juta Rupiah yang dibagikan ke setiap kelompok diharapkan bisa mengembangkan usaha kegiatan ekonomi kreatif di kedua kelurahan tersebut.

Peneliti memilih Kecamatan Majasari sebagai fokus penelitian karena di kecamatan ini program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sudah berjalan sejak Bulan Oktober 2013. Dalam observasi awal penelitian yang peneliti lakukan di kelompok KUBE Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu:

*Pertama*, pengelolaan program KUBE dirasa masih belum efektif, dimana sebagian masyarakat yang ikut serta dalam program KUBE tidak bisa melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan, ini bisa dilihat dari kelompok KUBE Rukun Mandiri 5 dan KUBE Campurak 1 kedua kelompok tersebut sudah tidak melanjutkan kegiatan usahanya, hal ini dikarenakan masyarakat anggota penerima bantuan program KUBE tersebut tidak pandai mengelola usaha yang mereka jalani, sehingga sebagian kelompok KUBE dalam melaksanakan program tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, (*Wawancara dengan Ibu Sri Pembimbing KUBE Kecamatan Majasari : Selasa, 15 November 2014, pukul 10.44*).

*Kedua*, masalah lain yang peneliti temukan dilapangan yakni ada beberapa KUBE belum bisa merasakan keuntungan usaha yang digeluti karena terkendala jenis usaha yang membutuhkan waktu lama agar bisa menuai hasil dari usaha tersebut, sementara pemerintah menargetkan dalam satu tahun harus menghasilkan keuntungan dari usaha yang digeluti, adapun usaha yang beresiko ini adalah ternak kambing, dimana 6 (enam) dari 10 (sepuluh) KUBE yang ada di

Kecamatan Majasari memilih usaha ternak kambing, misalnya saja kelompok KUBE Rukun Mandiri 4, dari modal 20 Juta yang diberikan 18,5 juta dipergunakan untuk pembelian bibit kambing (umuran anakan) dan sisanya 1,5 juta diperuntukan untuk pembuatan kandang, kelompok Rukun Mandiri 4 ini belum bisa mengandalkan hasil dari usahanya karena dalam pembelian bibit ternak yang semuanya hanya anakan yang menjadikan para anggota KUBE harus menunggu usia ternak sekitar 1,5 – 2 tahun untuk bisa dijual dipasaran adapun pembelian bibit kambing yaitu usia 4 bulan, adapun target mereka yaitu menyediakan kambing yang siap untuk dijadikan Akikah/Kurban ke Warga Kampung Cibunut yang membutuhkan. *(Wawancara dengan Bapak Kamsani, Ketua KUBE Rukun Mandiri 2 Kelurahan Cilaja : Jumat, 23 Januari 2015, pukul 15.32).*

*Ketiga*, sejauh ini program KUBE masih belum bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat penerima bantuan, karena ada masyarakat penerima bantuan yang memilih pekerjaan lain dibandingkan dengan menekuni usaha dari program bantuan tersebut, masyarakat beranggapan bahwa jika terus-menerus mengharapkan hasil dari usaha KUBE maka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal dengan adanya program KUBE ini diharapkan adanya tingkat taraf hidup yang lebih baik dalam masyarakat khususnya masyarakat penerima bantuan. *(Wawancara dengan Bapak Aning, Tokoh Masyarakat Kp. Pasir Bunut Kelurahan Cilaja : Kamis, 22 Januari 2015, pukul 14.40).*

Masih ditemukannya masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari menunjukkan

perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang bertanggung jawab demi terwujudnya pelaksanaan program kelompok usaha bersama yang efektif dan efisien dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Kecamatan Majasari.

Beranjak dari masalah-masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang dituangkan ke dalam skripsi dengan judul **“EVALUASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KECAMATAN MAJASARI”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah adalah mengidentifikasi dikaitkan dengan topik, tema, judul dan fenomena yang akan diteliti. Oleh sebab itu, setelah menyimak latar belakang diatas, maka Penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan program KUBE dirasa masih belum efektif, dimana sebagian masyarakat yang ikut serta dalam program KUBE tidak bisa melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan.
2. Beberapa KUBE belum bisa merasakan keuntungan usaha yang digeluti.
3. Sejauh ini program KUBE masih belum bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat penerima bantuan.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Dari uraian-uraian yang ada dalam latar belakang dan identifikasi masalah peneliti mempunyai keterbatasan kemampuan dan berfikir secara menyeluruh, maka dengan itu peneliti mencoba membatasi penelitiannya yang ada dalam



identifikasi masalah yaitu tentang evaluasi program kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada pendahuluan dan dengan memperhatikan fokus penelitian pada batasan masalah, maka hal yang menjadi kajian peneliti yaitu “Bagaimana Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari?”

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka diperlukannya tujuan penelitian sebab tanpa adanya tujuan yang jelas maka peneliti akan mengalami kesulitan. Sesuai latar belakang rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yaitu mengevaluasi dampak program kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian dikatakan berhasil apabila dapat memberikan manfaat penelitian. Manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

##### **1.6.1 Secara Teoritis**

- a. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu kebijakan publik.
- b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam

mengenai pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari.

### **1.6.2 Secara Praktis**

- a. Dapat dijadikan masukan bagi tim pelaksana program KUBE Kecamatan Majasari dalam melaksanakan program ini sekaligus sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program KUBE.
- b. Dapat berguna bagi Kecamatan Majasari sehingga menjadi umpan balik (*feed back*) dalam evaluasi implementasi program kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari sehingga pelaksanaan program ini bisa jauh lebih baik dimasa yang akan datang.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Penulisan proposal ini dibagi dalam tiga bagian yang masing-masing terdiri dari sub-bagian, yaitu sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Latar belakang masalah menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif, dari ruang lingkup yang paling umum hingga menitik ke masalah yang lebih spesifik, yang relevan dengan judul skripsi.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi Masalah akan memperjelas aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Identifikasi masalah dapat diajukan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan.

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah akan lebih mempersempit masalah yang akan diteliti, sehingga objek penelitian subjek penelitian, lokus penelitian, hingga periode penelitian secara jelas termuat.

## **1.4 Perumusan Masalah**

Bagian ini, peneliti mengidentifikasi masalah secara implisit secara tepat atas aspek yang akan diteliti seperti terpapar dalam latar belakang masalah dan pembatasan masalah.

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian akan mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian akan menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dari diadakannya penelitian ini.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan menjelaskan tentang isi bab per bab secara singkat dan jelas.

## **BAB II DESKRIPSI TEORI**

### **2.1 Deskripsi Teori**

Deskripsi teori memuat kajian terhadap sejumlah teori yang relevan dengan permasalahan dan variabel penelitian sehingga akan memperoleh konsep penelitian yang jelas.

### **2.2 Kerangka Berfikir**

Sub bab ini menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari deskripsi teori

### **2.3 Asumsi Dasar Penelitian**

Pada sub bab ini menjelaskan pikiran peneliti berdasarkan teori dan kerangka berfikir disesuaikan dengan observasi awal yang kemudian peneliti berasumsi tentang penelitian yang diteliti.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Metode Penelitian**

Sub bab ini menjelaskan metode yang dipergunakan dalam penelitian.

### **3.2 Instrumen Penelitian**

Sub bab instrumen penelitian menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan.

### **3.3 Informan Penelitian**

Dalam sub bab ini menjelaskan informan penelitian yang mana akan memberikan berbagai macam informasi yang dibutuhkan.

### **3.4 Teknik Pengolahan dan Analisa Data**

Menjelaskan teknik analisa beserta rasionalisasinya yang sesuai dengan sifat yang diteliti

### **3.5 Tempat dan Waktu**

Menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian dilaksanakan.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian**

Menjelaskan obyek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas.

### **4.2 Deskripsi Data**

Menjelaskan data yang telah didapatkan dari observasi di lapangan dan menjelaskan informan yang ditentukan dalam penelitian ini yang senantiasa berkaitan dengan permasalahan yang peneliti teliti.

### **4.3 Penyajian Data**

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diperoleh dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data yang relevan.

#### **4.5 Pembahasan Hasil Penelitian**

Menghubungkan temuan hasil penelitian di lapangan dengan dasar teori yang telah ditetapkan sejak awal.

### **BAB V PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Yang menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas dan mudah dipahami.

#### **5.2 SARAN**

Sub ini memberikan rekomendasi kepada kantor Kecamatan Majasari, sebagai tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti secara teoritis maupun praktis.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN**

#### **2.1 Kajian Teori**

Teori merupakan seperangkat konsep, definisi dan preposisi yang saling berhubungan yang disusun secara sistematis sebagai hasil dari penulisan ilmiah terdahulu dengan menggunakan seperangkat metodologi penulisan tertentu untuk menjelaskan gejala tertentu atau hubungan-hubungan dalam fenomena yang sedang diteliti. Berbagai teori yang dikemukakan dalam kajian teori disini merupakan sarana untuk menjawab rumusan masalah yang telah dituliskan dimuka dan sebagai landasan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini.

Dalam bab ini penulis akan membahas yang *pertama* kebijakan publik, *kedua* implementasi kebijakan, *ketiga* evaluasi kebijakan dan *keempat* program kelompok usaha bersama (KUBE).

##### **2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan

masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Dwidjowidjoto, 2004: 1-7).

Terkait dengan kebijakan publik, menurut Dye penulis buku “*Understanding Public Policy*” (Dwidjowidjoto, 2004:3), kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil. Sementara Menurut Dye (1981:1:1) kebijakan publik merupakan apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*).

Laswell dan Kaplan dalam Dye (1981:2) berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat, ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dari beberapa definisi kebijakan publik diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah), berorientasi pada kepentingan publik dengan dipertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya

dampak yang ditimbulkan, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

### **2.1.2 Implementasi Kebijakan**

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individu maupun kelompok atau institusi.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*to implement*" yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

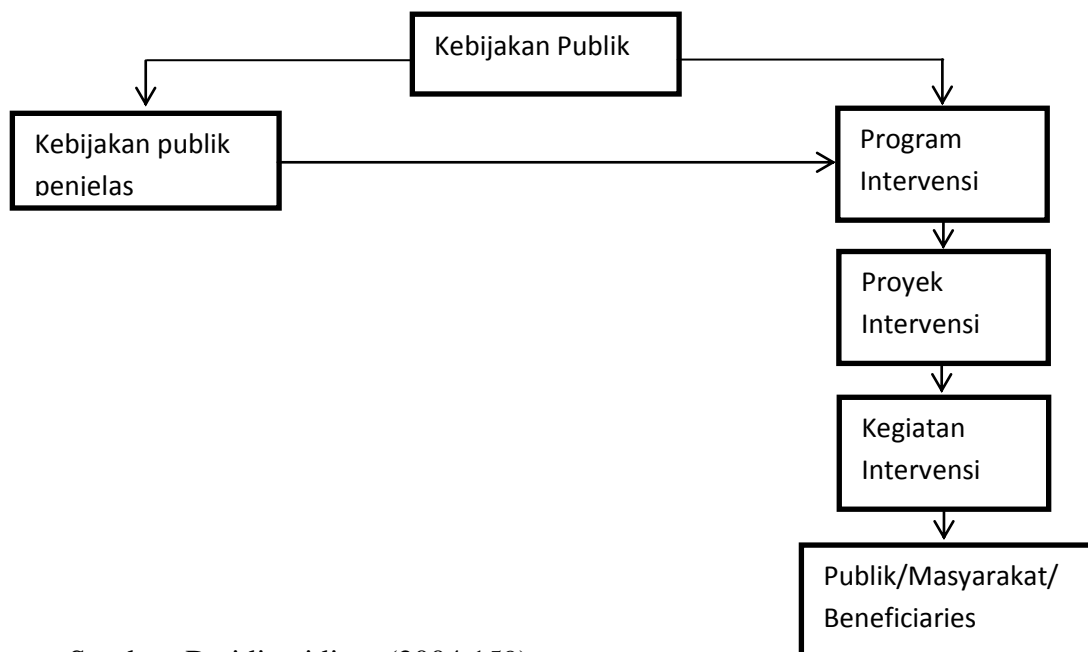
Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2006:139), implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses Implementasi.

Menurut Dunn (2003:132), implementasi kebijakan (*policy implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. Sementara Menurut Dwidjowidjoto (2004:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1

Rangkaian Implementasi Kebijakan



Sumber: Dwidjowidjoto (2004:159)

Gambar diatas menunjukkan bahwa langkah yang dipilih untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan yaitu melalui formulasi turunan dari kebijakan publik, selanjutnya menjadi sebuah kebijakan publik penjas, kemudian menghasilkan sebuah program intervensi yang akhirnya membentuk proyek intervensi. Dalam proyek tersebut terdapat kegiatan intervensi yang ditujukan untuk publik/masyarakat.

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

#### **2.1.2.1 Teori George C. Edwards III**

Menurut Edwards III dalam Subarsono (2005:90-92), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

##### **1. Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran tidak jelas bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya  
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yaitu kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi agar efektif.
3. Disposisi  
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap/perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi  
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tapa*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

#### 2.1.2.2 Teori Merilee S. Grindle

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle dalam Agustino (2006:154) dikenal dengan *Implementasi as A Political and Administrative Proces*. Keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan,
2. Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran,
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang

sekedar memberikan bantuan kredit bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin,

4. Apakah letak sebuah program sudah tepat,
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci,
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup :

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa,
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

### **2.1.2.3 Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A.Sabatier**

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005:94), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu karakteristik dari masalah (*tracability of thr problem*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statue to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatory variables afeecting implementation*).

Karakteristik kebijakan mencakup kejelasan isi kebijakan, besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan, serta tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

Lingkungan kebijakan mencakup kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap suatu kebijakan serta sikap dari kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat seperti kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana.

#### **2.1.2.4 Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn**

Menurut Meter dan Horn dalam Subarsono (2005:99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi agar tidak terjadi multi interpretasi dan menimbulkan konflik diantara para agen implementasi, sumberdaya seperti sumberdaya manusia dan sumberdaya non-manusia, hubungan antar organisasi bagi keberhasilan suatu program, karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.

#### **2.1.2.5 Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli**

Menurut Cheema dan Rondinelli dalam Subarsono (2005:101) menyatakan bahwa terdapat empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program yaitu :

1. Kondisi lingkungan seperti karakteristik struktur politik lokal, kendala sumberdaya, sosio kultural, derajat keterlibatan para penerima program.
2. Hubungan antar organisasi seperti kejelasan dan konsistensi sasaran program, standarisasi prosedur perencanaan, anggaran, implementasi dan evaluasi.
3. Sumberdaya organisasi seperti keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program, pendapatan yang cukup untuk pengeluaran serta kontrol terhadap sumber dana.
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana seperti komitmen petugas terhadap program, keterampilan teknis dan manajerial petugas, kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol dan mengintegritaskan keputusan.



### **2.1.2.6 Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining**

Dalam pandangan Weimer dan Vining dalam Subarsono (2005:103) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program yaitu :

1. Logika kebijakan. Dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis. Isi dari suatu kebijakan atau program harus mencakup berbagai aspek yang dapat memungkinkan kebijakan atau program tersebut dapat diimplementasikan pada tataran praktis.
2. Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis.
3. Kemampuan implementor kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan.

### **2.1.3 Evaluasi Kebijakan**

Sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.

Menurut Mustofadjaja (2002:45), evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” didalamnya terkandung pertimbangan nilai (value judgment) tertentu. Fenomena yang dinilai tergantung kepada konteksnya. Manakala konteksnya kebijakan publik, maka fenomena yang dinilai menurut Mustofadjaja dalam Widodo (2007:111) adalah berkaitan dengan “tujuan, sasaran kebijakan, kelompok sasaran (target groups) yang ingin dipengaruhi, berbagai instrumen

kebijakan yang akan digunakan, responsi dari lingkungan kebijakan kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi, dan sebagainya.

Evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat atau mengukur tingkat kinerja pelaksanaan suatu kebijakan publik yang latar belakang dan alasan-alasan diambilnya sesuatu kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan, berbagai instrumen kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan, responsi kelompok sasaran dan stakeholder lainnya serta konsistensi aparat, dampak yang timbul dan perubahan yang ditimbulkan, perkiraan perkembangan tanpa kehadirannya dan kemajuan yang dicapai kalau kebijakan dilanjutkan atau diperluas. Evaluasi kebijakan bisa saja mempersoalkan pada tataran “abstrak” berupa pemikiran, teori, ataupun paradigma yang mendasari suatu kebijakan apabila dipandang perlu.

Menurut Muhadjir dalam Widodo (2007:112), evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan atau target kebijakan publik yang ditentukan.

Dalam bukunya Agustino (2006:188), kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi :

1. Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
2. Apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam bagian

ini evaluasi kebijakan juga harus memperhatikan persoalan-persoalan hak asasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan.

3. Bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan output dan outcome dari suatu implementasi kebijakan. Ketajaman penglihatan ini yang diperlukan oleh publik ketika melihat hasil evaluasi kebijakan, sehingga fungsinya untuk memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya menjadi realisasi dari perwujudan *right to know* bagi warga masyarakat.

Menurut Laster dan Steward dalam Widodo (2000:126), evaluasi ditunjukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Menurut Winanro (2000:26), sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan.

Menurut Suchhman dalam Winarno (2002:169), terdapat enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi

5. Menentukan apakah perubahan yang terjadi merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.

Menurut Dunn (2003:608), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assement*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh publik/negara. Dengan adanya evaluasi, kebijakan-kebijakan kedepan akan menjadi lebih baik dan tidak mengurangi kesalahan yang sama.

Sifat evaluasi menurut Dunn (2003:608), yaitu :

1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi.
2. Interdependensi fakta-nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta: maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau rendah diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk

menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu.

3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Evaluasi kebijakan diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil dari masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex-post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex-ante*).
4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan. Evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Tabel 2.1  
Kriteria Evaluasi Kebijakan

<b>Tipe kriteria</b>	<b>Penjelasan</b>
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Sumber : William N. Dunn (2003:610)

Pada penelitian ini yaitu evaluasi kebijakan terhadap pelaksanaan program kelompok usaha bersama (KUBE) yang dilaksanakan di Kecamatan Majasari. Dilakukan evaluasi untuk mengukur kesesuaian antara tujuan, target kebijakan serta hasil yang dicapai oleh masyarakat penerima bantuan tersebut.

Anderson (157-160) mengidentifikasi bahwa terdapat enam masalah yang akan dihadapi dalam proses evaluasi kebijakan, yaitu :

1. Ketidakpastian atas tujuan-tujuan kebijakan. Tujuan-tujuan program yang disusun untuk menjalankan kebijakan seharusnya jelas. Bila tujuan-tujuan dari suatu kebijakan tidak jelas atau tersebar, sebagaimana seringkali terjadi, maka kesulitan yang timbul adalah menentukan sejauh mana tujuan-tujuan tersebut telah dicapai.
2. Kuasitas. Bila seorang evaluator menggunakan evaluasi sistemik untuk melakukan evaluasi terhadap program-program kebijakan, maka ia harus memastikan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan nyata harus disebabkan oleh tindakan-tindakan kebijakan.
3. Dampak kebijakan yang menyebar. Pada waktu kita membahas mengenai dampak dibagian lain, kita mengenal apa yang dimaksud eksternalitas atau dampak yang melimpah, yakni suatu dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pada keadaan-keadaan atau

kelompok-kelompok selain mereka yang menjadi sasaran atau tujuan kebijakan.

4. Kesulitan-kesulitan dalam memperoleh dana. Sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya, kekurangan data statistik dan informasi-informasi lain yang relevan barangkali akan menghalangi para evaluator untuk melakukan evaluasi kebijakan.
5. Resistensi pejabat. Evaluasi kebijakan atau sering disebut sebagai analisis kebijakan, yakni suatu pengukuran terhadap dampak dari suatu kebijakan.

Terdapat beberapa tujuan dari evaluasi kebijakan, antara lain :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan

yang mungkin terjadi dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

6. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Adapun kegunaan dari evaluasi kebijakan publik adalah memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan, menjadikan kebijakan, program dan kegiatan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik serta membantu stakeholder belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam evaluasi terdapat jenis-jenis evaluasi kebijakan, yaitu :

- a. Menurut waktu pelaksanaan :
  1. Evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan pada pelaksanaan program, bertujuan memperbaiki pelaksanaan program, temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaan program.
  2. Evaluasi summatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai, bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program, temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program.
- b. Menurut tujuan :



1. Evaluasi proses, yaitu evaluasi yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan (*service delivery*).
2. Evaluasi biaya-manfaat, yaitu evaluasi yang mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif penggunaan sumberdaya dan manfaat dari program.
3. Evaluasi dampak, yaitu evaluasi yang mengkaji apakah program memberikan pengaruh yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga, masyarakat dan kelembagaan.

Penelitian ini termasuk ke dalam evaluasi dampak karena evaluasi dampak mengkaji apakah program kelompok usaha bersama (KUBE) memberikan pengaruh yang diinginkan oleh masyarakat di Kecamatan Majasari.

#### **2.1.4 Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**

Terry dalam (Tachjan, 2006:32) mengemukakan “program adalah rencana yang bersifat komperhensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Siagian dalam (Tachjan, 2006:33) mengemukakan :sebuah program harus memiliki (1) Sasaran yang hendak dicapai, (2) jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, (3) Besarnya biaya dan sumbernya, (4) Jenis kegiatan yang dilaksanakan, (5) Tenaga kerja yang dibutuhkan, dari segi jumlah maupun keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan”.

KUBE adalah Kelompok Usaha Bersama yang terdiri dari Kepala Keluarga-Kepala Keluarga fakir miskin. KUBE menurut Sumodiningrat (2009:88) adalah :

“Kelompok warga atau keluarga binaan yang dibentuk warga atau keluarga yang telah dibina melalui proses kegiatan pemberdayaan untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya”.

KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegritas dari keseluruhan proses pemberdayaan masyarakat. Menurut Departemen Sosial R.I (2008)

“KUBE adalah himpunan dari keluarga yang tergolong miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah usaha bersama”.

Selanjutnya Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin Departemen Sosial RI (2009) menggaris bawahi bahwa KUBE adalah kelompok warga masyarakat miskin yang terdiri dari 5-10 KK atau lebih untuk melaksanakan kegiatan usaha ekonompi produktif dan usaha kesejahteraan sosial yang hidup dalam kebersamaan, kegotong-royongan dan saling tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial para anggotanya.

#### **2.1.5 Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**

### **2.1.5.1 Pengertian**

1. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan PROKESOS untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya
2. KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan proses PROKESOS dalam rangka Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK).
3. KUBE tidak dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan prosedur baku PROKESOS kecuali untuk Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin yang mencakup keseluruhan proses. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan berusaha, bantuan stimulans dan pendampingan.

### **2.1.5.2 Dasar Hukum**

KUBE di bentuk berdasarkan hukum yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 dan 34.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

- c. Peraturan Pemerintah RI No. 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.
- d. Keputusan Menteri Sosial RI No. 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir Miskin.
- e. Keputusan Menteri Sosial RI No. 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Pemberian Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
- f. Keputusan bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, dan Menteri Sosial No. 05/SKB/M/V/1999 dan No. 45/HUK/1999 tentang pembinaan dan pengembangan KUBE melalui Pembentukan Koperasi.

### **2.1.5.3 Tujuan dan Sasaran KUBE**

Tujuan KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan, melalui :

1. Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok
2. Peningkatan pendapatan
3. Pengembangan usaha
4. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar.

Sasaran PROKESOS dalam kaitan dengan kebijakan MPMK adalah PMKS yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan rincian sebagai berikut :

1. Keluarga Fakir Miskin yang dibina melalui Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir miskin
2. Kelompok Masyarakat Terasing yang dibina melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing.
3. Para Penyandang Cacat yang dibina melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
4. Lanjut Usia yang dibina melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
5. Anak Terlantar yang dibina melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar
6. Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang dibina melalui Program Peningkatan Peranan Wanita di Bidang Kesejahteraan Sosial
7. Keluarga Muda Mandiri yang dibina melalui Program Pembinaan Keluarga Muda Mandiri
8. Remaja dan Pemuda yang dibina melalui Program Pembinaan Karang Taruna Keluarga Miskin di Daerah Kumuh yang dibina melalui Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).

#### **2.1.5.4 Proses Pembentukan KUBE**

Selain KUBE yang ditumbuhkembangkan melalui Program Bantuan Kesejahteraan Fakir Miskin, langkah / kegiatan pokok pembentukan KUBE untuk sasaran PMKS lainnya adalah :

1. Pelatihan ketrampilan berusaha, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan praktis berusaha yang disesuaikan dengan minat dan ketrampilan PMKS serta kondisi wilayah, termasuk kemungkinan pemasaran dan pengembangan basil usahanya. Nilai tambah lain dari pelatihan adalah tumbuhnya rasa percaya diri dan harga diri PMKS untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan memperbaiki kondisi kehidupannya
2. Pemberian bantuan stimulan sebagai modal kerja atau berusaha yang disesuaikan dengan ketrampilan PMKS dan kondisi setempat. Bantuan ini merupakan hibah (bukan pinjaman atau kredit) akan tetapi diharapkan bagi PMKS penerima bantuan untuk mengembangkan dan menggulirkan kepada warga masyarakat lain yang perlu dibantu
3. Pendampingan, mempunyai peran sangat penting bagi berhasil dan berkembangnya KUBE, mengingat sebagian besar PMKS merupakan kelompok yang paling miskin dan penduduk miskin. Secara fungsional pendampingan dilaksanakan oleh PSK yang dibantu oleh infrastruktur kesejahteraan sosial di daerah seperti Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS) dan Panita Pemimpin Usaha Kesejahteraan Sosial (WPUKS).

### **2.1.5.5 Organisasi dan Manajemen**

#### **1. Kepengurusan KUBE**

- Pada hakekatnya KUBE dibentuk dari, oleh dan untuk anggota kelompok
- Pengurus KUBE dipilih dari anggota kelompok yang mau dan mampu mendukung pengembangan KUBE, memiliki kualitas seperti kesediaan mengabdikan, rasa keterpanggilan, mampu mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, mempunyai keuletan, pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta yang penting adalah merupakan hasil pilihan dari anggotanya.

#### **2 Keanggotaan KUBE**

- Anggota KUBE adalah PMKS sebagai sasaran program yang telah disiapkan. Jumlah anggota untuk setiap KUBE berkisar antara 5 sampai 10 orang / KK sesuai dengan jenis PMKS
- Khusus untuk Pembinaan Masyarakat Terasing dan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh pembentukan KUBE berdasarkan unit pemukiman sosial, artinya suatu unit pemukiman sosial adalah satu KUBE

#### **3. Administrasi KUBE**

- Untuk dapat berjalan dan berkembangnya KUBE dengan baik, maka pengurus maupun pengelola KUBE perlu memiliki catatan atau administrasi yang baik, yang mengatur keanggotaan, organisasi, kegiatan, keuangan, pembukuan dan lain sebagainya.

- Catatan dan administrasi KUBE meliputi antara lain buku anggota, buku peraturan KUBE, pembukuan keuangan / pengelolaan hasil, daftar pengurus dan sebagainya

#### **2.1.5.6 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi**

1. Pembinaan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penumbuhan dan pengembangan KUBE, disamping meningkatkan motivasi dan kemampuan pelaksanaan dilapangan serta kapasitas manajemen pengelola KUBE. Pembinaan dilaksanakan oleh petugas sosial wilayah mulai dan tingkat propinsi, kabupaten / kodya, kecamatan dan desa / kelurahan secara berjenjang
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan KUBE dan permasalahan yang merupakan hambatan serta upaya pemecahannya, sehingga upaya penumbuhan dan pengembangan KUBE berjalan sesuai dengan rencana
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi beserta pelaporannya dilaksanakan melalui mekanisme secara berjenjang mulai dan tingkat desa, kecamatan, kabupaten / kodya, provinsi dan pusat dalam koordinasi Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) PROKESRA secara berjenjang.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan suatu tinjauan pustaka, sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan



dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Reiza Rusman Wijaya (2012) dengan judul Evaluasi Program Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK) di Kecamatan Walantaka Kota Serang. Masalah penelitian ini karena proses seleksi calon penerima bantuan yang kurang cermat sehingga tidak sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan, terdapat unsur nepotisme pada penyelenggaraan kegiatan program AKSK, pemerintah yang memiliki program tersebut kurang mengawasi pelaksanaan kegiatan AKSK, koordinasi yang kurang terbangun antara Dinas Sosial Provinsi/Kota Serang dengan pihak Desa dan Kecamatan selaku pemilik wilayah, kurangnya kesadaran masyarakat yang mendapat bantuan tersebut untuk mengelola, memberdayakan dan mengembangkan bantuan tersebut. Peneliti ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan Teori Kriteria Evaluasi Menurut William N Dunn. Persamaan penelitian ini yaitu terdapat pada subjek penelitian yaitu evaluasi dan teori yang digunakan dalam penelitian, adapun perbedaannya yaitu objek penelitiannya berbeda yaitu Program Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK) dan yang menjadi tempat penelitiannya pun berbeda yaitu di Kota Serang sedangkan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. Kritik peneliti seharusnya dalam hal penyajian data hasil wawancara lebih menggunakan bahasa yang umum dengan sedikit mengurangi dialek bahasa daerah sehingga dalam membaca penelitian ini mudah untuk memahami maksud dari pemaparan hasil wawancara tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nenda Mesa Nur Fitriani (2012) dengan judul Evaluasi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. Masalah penelitian ini karena kriteria RTSM dari BPS tidak diterapkan tepat sasaran dan tidak transparan, warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan belum memahami mengenai pemanfaatan dari Program Keluarga Harapan, adanya pemberian tanda “terimakasih” dari penerima bantuan Program Keluarga Harapan ke Pendamping PKH dan aparatur desa, warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang belum memahami mengenai sanksi terhadap pelanggaran terhadap syarat yang telah ditentukan, mengakibatkan kecemburuan sosial antar warga penerima PKH dengan warga non penerima PKH. Peneliti ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kuantitatif, persamaan. Persamaan penelitian ini yaitu terdapat pada subjek penelitian yaitu evaluasi dan lokus penelitiannya juga sama yaitu di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. adapun perbedaannya yaitu objek penelitiannya berbeda yaitu Program Keluarga Harapan sementara peneliti meneliti tentang program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kritik peneliti ini tidak menggunakan Teori penelitian yang biasanya digunakan oleh setiap penelitian.

### **2.3 Kerangka Berfikir**

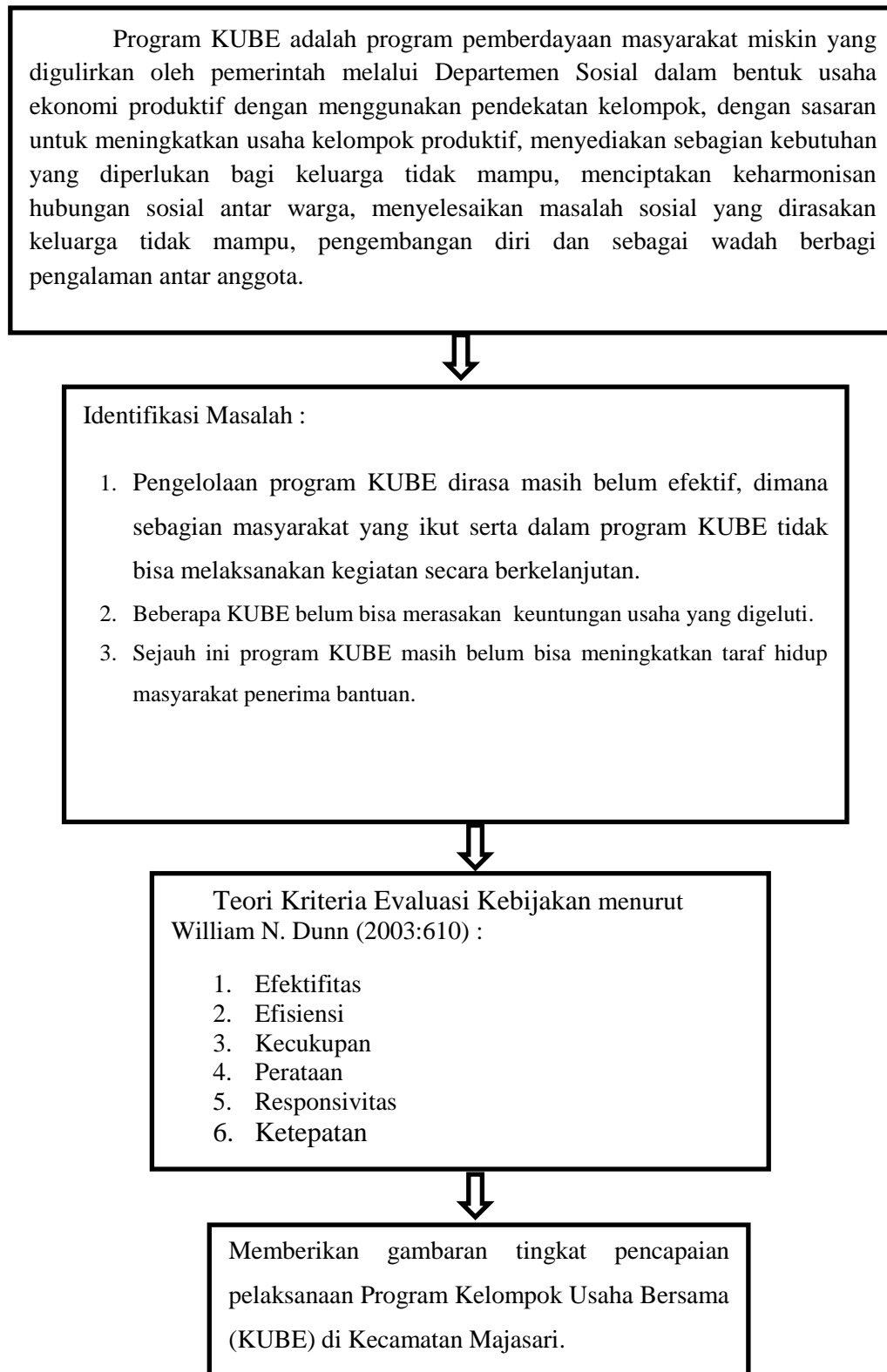
Kerangka berfikir merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan focus/judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti evaluasi program kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari, dalam upaya menjawab rumusan masalah penelitian ini penulis mengambil teori model evaluasi dari William N. Dunn, dimana terdapat enam kriteria atau indikator untuk mengevaluasi hasil kebijakan tersebut, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan perataan, responsivitas dan ketepatan. Kemudian dengan menggunakan enam indikator tersebut, peneliti akan mengevaluasi pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari.

Dalam hal ini peneliti mencoba untuk mendeskripsikan evaluasi implementasi program KUBE tersebut dengan apa yang sebenarnya terjadi dilapangan, untuk memperoleh data-data dan informasi tentang bagaimana implementasi program KUBE tersebut, peneliti melakukan pengamatan dan melakukan wawancara dengan informan baik itu dari Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Camat Kecamatan Majasari, Ketua/Anggota KUBE, dan Masyarakat itu sendiri.

Untuk lebih jelasnya, kerangka berfikir penulis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2**  
**Alur Kerangka Berfikir Penelitian**



## **2.4 Asumsi Dasar**

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan diatas, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi penelitian tentang Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam kenyataannya belum dapat dikatakan berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat penerima bantuan tersebut di Kecamatan Majasari.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari ini adalah Metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Jenis metode deskriptif ini sesuai dengan tujuan Penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu menggambarkan serta memaparkan dengan cermat kondisi yang berlangsung selama penelitian dilakukan di tengah masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang khususnya Kecamatan Majasari. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut :

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai sumber instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generasi (Sugiyono, 2010:1)

Alasan penulis memilih menggunakan jenis penelitian deskriptif karena dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis dapat menggambarkan suatu objek penelitian dan mengamati secara lebih khusus dan mendalam permasalahan yang terjadi sehingga pengetahuan pada saat tertentu dapat dijelaskan secara lebih rinci dan dicarikan solusi untuk memecahkan permasalahan yang timbul.

Alasan lain kenapa penulis memilih metode deskriptif adalah karena penelitian deskriptif memungkinkan penulis untuk dapat menggambarkan secara jelas bagaimana evaluasi program kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari tersebut agar lebih mudah dipahami. Dengan demikian, permasalahan yang timbul mendapatkan penyelesaian dan jawaban yang tepat.

Penulis mencoba mengkaji dengan menggunakan pendekatan Kualitatif karena pendekatan kualitatif cocok untuk digunakan dalam melakukan penelitian tentang Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari.

Bogdan dan Tylor dalam Moleong (2010) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Jane Richie dalam Moleong (2010) penelitian kualitatif merupakan upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Dari kajian tersebut, dapat disintesis bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010: 4).

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang

lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori, karena tujuannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur perolehan data dan jenis penelitian kualitatif juga berbeda.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokus di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang dan studi kasusnya Kelurahan Pagerbatu dan Kelurahan Cilaja. Selain itu peneliti akan melakukan penelitian di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pandeglang yang berada di Jalan Raya Serang KM.03 Cigadung Pandeglang.



### **3.4 Variabel Penelitian**

Sugiyono (2010:61) menjelaskan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

#### **3.4.1 Definisi Konsep**

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kriteria Evaluasi Kebijakan dari William N. Dunn (2003:610), yang menjelaskan bahwa dalam kriteria evaluasi kebijakan terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yaitu :

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Variabel Evaluasi Kebijakan Publik yang disebutkan diatas, dinilai dan dianggap lebih rasional dan tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada Evaluasi Program KUBE ini.

### 3.4.2 Definisi Operasional

Pada penelitian Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang, teori yang digunakan adalah teori kriteria evaluasi William N.Dunn, berikut rincian dari dimensi dan indikator yang digunakan pada tabel 3.1 dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional Penelitian**

Dimensi	Indikator	Pertanyaan
Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang	Efektifitas	Bagaimana tingkat keberhasilan pencapaian target program kelompok usaha bersama (KUBE)
		Bagaimana waktu pelaksanaan program?
	Efisiensi	Bagaimana usaha pengelolaan anggaran (biaya) oleh anggota KUBE dalam melaksanakan usahanya?
		Bagaimana upaya anggota KUBE agar bisa memaksimalkan waktu pelaksanaan program?
	Kecukupan	Bagaimana program KUBE dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan masyarakat?
		Bagaimana penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan program KUBE?
	Perataan	Bagaimana manfaat dari program KUBE apakah bisa dirasakan merata oleh kelompok masyarakat yang menerima bantuan program KUBE?
	Responsivitas	Bagaimana respon masyarakat penerima bantuan program KUBE dalam menilai pelaksanaan program KUBE?
		Bagaimana upaya-upaya tim pendamping dalam menanggapi pemenuhan kebutuhan seluruh anggota KUBE?
	Ketepatan	Apakah program KUBE merupakan kebijakan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
		Apakah dana yang bergulir jumlahnya sudah bisa mencukupi kebutuhan anggota kelompok usaha bersama?
		serta bagaimana cara penyaluran dana bantuan program KUBE kepada anggota kelompok penerima bantuan?

### 3.5 Instrumen Penelitian

Mengenai instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif, Irawan (2006:15) menjelaskan bahwa satu-satunya instrument dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, video kaset, atau kamera. Peneliti sebagai instrument ini disebut "*participant-observer*". Peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada objek atau subjek yang ditelitinya dan dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya melakukan refleksi secara terus menerus dan secara gradual "membangun" pemahan yang tuntas tentang suatu hal.

Berdasarkan pengertian Irawan, peneliti menyimpulkan bahwa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari ini adalah peneliti sendiri dengan menempatkan diri sebagai *participiant observer*.

### 3.6 Informan Penelitian

Bagi peneliti, informan adalah orang yang membantu agar dapat menyatu dengan masyarakat setempat, terutama bagi peneliti yang belum begitu mengenal tentang sistem kehidupan, adat-istiadat dan kebudayaan setempat. Di samping itu manfaat informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

Menurut Prof. Dr. Djam'an Satori, M.A. mendefinisikan informan sebagai berikut:

“Informan adalah orang dalam pada latar penelitian. Fungsinya untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan menjadi anggota penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim, ia dapat memberikan pandangan dari segi orang-dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian tersebut”.

Sementara Suharsimi Arikunto memberikan definisi Informan adalah:

“orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh peneliti. Istilah informan ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif”.(Arikunto, 2002:122)

Informan dipilih secara *purposive* atau sengaja ditentukan dan dipilih sebelumnya, untuk mendapatkan informan yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti. Dari pendapat Lincoln dan Guba, Sugiyono mengemukakan bahwa penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposif*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. (Sugiyono, 2006:96)

Berdasarkan uraian tersebut penulis menentukan informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Daftar Informan Penelitian**

No	Kode Informan	Informan	Alasan	Informasi yang Diharapkan	Keterangan Informan
1	I <sub>1</sub>	Kapala Dinas Sosial Tenaga Kerja, Kabupaten Pandeglang	Karena beliau sebagai pemangku kebijakan program KUBE di Kabupaten Pandeglang	Seputar informasi mengenai program kelompok usaha bersama (KUBE).	<i>Key Informan</i>
2	I <sub>2</sub>	Camat Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang	Karena beliau yang menerima wewenang untuk mengatur pelaksanaan program KUBE di Kecamatan Majasari.	Seputar informasi mengenai program kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari	<i>Key Informan</i>
3	I <sub>3</sub>	Pendamping program KUBE Kec. Majasari	Karena Mereka Selaku pendamping pelaksana program KUBE di Kecamatan Majasari.	Seputar informasi mengenai pendampingan program kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari	<i>Key Informan</i>
4	I <sub>4</sub>	Pendamping Program KUBE Kelurahan Cilaja/ Kelurahan Pagerbatu	Karena Mereka Selaku pendamping pelaksana program KUBE di Kelurahan Cilaja dan Kelurahan Pagerbatu Kecamatan Majasari.	Seputar informasi mengenai pendampingan program kelompok usaha bersama (KUBE) di Kelurahan Cilaja dan Kelurahan Pagerbatu	<i>Key Informan</i>

				Kecamatan Majasari	
5	I <sub>5</sub>	Ketua/Anggota KUBE di Kecamatan Majasari	Karena Mereka Selaku pelaksana program KUBE.	Seputar pelaksanaan program KUBE di Kecamatan Majasari	<i>Key Informan</i>
6	I <sub>6</sub>	Tokoh Masyarakat Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari	Karena tokoh masyarakat memiliki fungsi pengawasan dalam pelaksanaan program KUBE di Kecamatan Majasari	Seputar informasi mengenai pelaksanaan teknis program KUBE di Kecamatan Majasari.	<i>Secondary Informan</i>
7	I <sub>7</sub>	Tokoh Masyarakat Kelurahan Pagerbatu Kecamatan Majasari	Karena tokoh masyarakat memiliki fungsi pengawasan dalam pelaksanaan program KUBE di Kecamatan Majasari	Seputar informasi mengenai pelaksanaan teknis program KUBE di Kecamatan Majasari.	<i>Secondary Informan</i>

*Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017.*

Daftar informan tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan objek penelitian yang lebih mengetahui kondisi di lapangan dalam fokus yang akan dikaji oleh peneliti. Oleh karena itu, data dan informasi yang peneliti peroleh dari proses observasi, wawancara maupun dokumentasi dapat dipastikan kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dilakukan karena dari informan tersebut belum mampu memberikan data dan informasi yang akurat.

### 3.7 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

#### 3.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono 2010:62).

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan dalam empat cara yaitu sebagai berikut :

##### 1. Wawancara

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama, dalam mencari informasi, peneliti melakukan jenis wawancara *autoanamnesa* (wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden). Penulis menggunakan teknik wawancara mendalam untuk mengetahui dan menggali informasi dari sumber (informan) yang secara

langsung berhubungan dengan peristiwa atau kejadian. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara secara mendalam kepada beberapa orang yang memiliki peran penting/utama dalam peristiwa yang diteliti untuk memperoleh data dan informasi berdasarkan sudut pandang pelaku. Dengan demikian, penulis akan memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai peristiwa yang sedang diteliti.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitifitas pertanyaan, kontak mata dan kepekaan nonverbal. Beberapa tips saat melakukan wawancara adalah mulai dengan pertanyaan yang mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari pertanyaan *multiple*, jangan menanyakan pertanyaan pribadi sebelum *building rapport*, ulang kembali jawaban untuk klarifikasi, berikan kesan positif, dan kontrol emosi negatif.

Wawancara dilakukan dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan berbagai keperluan yang dibutuhkan yaitu penentuan informan yang terdiri dari informan kunci dan informan sekunder, kriteria informan dan pedoman wawancara disusun terlebih dahulu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Selain itu, sebelum melakukan wawancara peneliti juga melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menerangkan tujuan dan kepentingan wawancara .
- Menjelaskan alasan informan terpilih untuk diwawancarai.
- Menjelaskan kegunaan hasil penelitian.



Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi dan menarik perhatian informan untuk mau diwawancarai dan menghindari kecurigaan informan terhadap peneliti dan diharapkan informan memberikan keterangan dengan jujur, selanjutnya peneliti mencatat keterangan-keterangan yang didapat.

Adapun pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pedoman Wawancara**

<b>No</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Kisi-kisi Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>
1	Efektifitas	Bagaimana tingkat keberhasilan pencapaian target program kelompok usaha bersama (KUBE) serta bagaimana waktu pelaksanaan program?	1. Disnakertransos Kab. Pandeglang, 2. Camat Majasari, 3. Pendamping KUBE Kecamatan. 4. Pendamping KUBE Kelurahan.
2	Efisiensi	Bagaimana usaha pengelolaan anggaran (biaya) oleh anggota KUBE dalam melaksanakan usahanya, serta bagaimana upaya anggota KUBE agar bisa memaksimalkan waktu pelaksanaan program?	1. Pendamping Program KUBE Kecamatan. 2. Pendamping Program KUBE Kelurahan 3. Ketua / Anggota Kelompok Usaha Bersama.
3	Kecukupan	Bagaimana program KUBE dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan masyarakat, dan bagaimana penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan program KUBE?	1. Ketua / Anggota Kelompok Usaha Bersama. 2. Tokoh Masyarakat.
4	Perataan	Bagaimana manfaat dari	1. Ketua / Anggota

		program KUBE apakah bisa dirasakan merata oleh kelompok masyarakat yang menerima bantuan program KUBE?	Kelompok Usaha Bersama. 2. Tokoh Masyarakat.
5	Responsivitas	Bagaimana respon masyarakat penerima bantuan program KUBE dalam menilai pelaksanaan program KUBE, serta bagaimana upaya-upaya tim pendamping dalam menanggapi pemenuhan kebutuhan seluruh anggota KUBE.	1. Ketua / Anggota Kelompok Usaha Bersama. 2. Pendamping Program KUBE Kecamatan. 3. Pendamping Program KUBE Kelurahan.
6	Ketepatan	Apakah program KUBE merupakan kebijakan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan apakah dana yang bergulir jumlahnya sudah bisa mencukupi kebutuhan anggota kelompok usaha bersama, serta bagaimana cara penyaluran dana bantuan program KUBE kepada anggota kelompok penerima bantuan?	1. Disnakertransos Kab. Pandeglang, 2. Camat Majasari, 3. Masyarakat.

*Sumber: Hasil Olahan Penulis 2017.*

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara yang tidak terstruktur, dimana peneliti bebas mewawancarai dan menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.

## **2. Observasi**

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa,

waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian dengan cara terjun langsung ke lapangan, untuk melihat dan menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti situasi, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Bungin (2007: 118) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur. Berikut penjelasan teknik observasi yang dikemukakan bungin :

1. Observasi partisipasi (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana *observer* atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
2. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide* observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.
3. Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam observasi adalah topografi, jumlah dan durasi, intensitas atau kekuatan respon, stimulus

kontrol (kondisi dimana perilaku muncul), dan kualitas perilaku pelaku. Didalam penulisan Metode Penelitian Administrasi ini, penulis menggunakan jenis observasi partisipasi.

### **3. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, *memorial*, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, data tersimpan di *website*, dan lain-lain.

Berbagai bentuk dokumentasi tersebut akan digunakan oleh penulis sebagai salah satu sumber data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Alasan penulis menggunakan teknik tersebut ialah sifat utama data ini yang tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Meski kejadian atau peristiwa yang ingin diamati sudah berlalu, namun bahan dokumenter ini menyajikan informasi serta data yang merekam peristiwa atau kejadian tersebut ke dalam berbagai bentuk yang dapat diteliti dan dikaji lebih dalam di masa sekarang atau yang akan datang.

#### 4. Triangulasi

Moleong (2006:330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Denzin (Prastowo, 2011:269) membedakan teknik ini menjadi lima macam yaitu :

1. Triangulasi sumber, yaitu suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik yaitu, yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.
3. Triangulasi waktu, suatu teknik pengecekan kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
4. Triangulasi penyidik, cara pemeriksaan kredibilitas data yang dilakukan dengan memanfaatkan pengamat lain untuk pengecekan derajat kepercayaan data.
5. Triangulasi teori, yaitu cara pemeriksaan kredibilitas data yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teori untuk memeriksa data temuan penelitian.

Semua macam triangulasi diatas, peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan triangulasi sumber data dan teknik. Triangulasi sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dari para informan yang dituju. Sedangkan triangulasi teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi lapangan dan dokumentasi.

### **3.7.2 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah suatu fase penelitian kualitatif yang sangat penting karena melalui analisis data inilah peneliti dapat memperoleh wujud dari penelitian yang dilakukannya. Analisis adalah suatu upaya mengurai menjadi bagian-bagian, sehingga susunan/tatanan bentuk sesuai yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau dengan lebih jernih dimengerti permasalahannya. Menganalisis data adalah suatu aktivitas yang tidak akan sama bentuk dan langkahnya antara satu orang dengan yang lainnya.

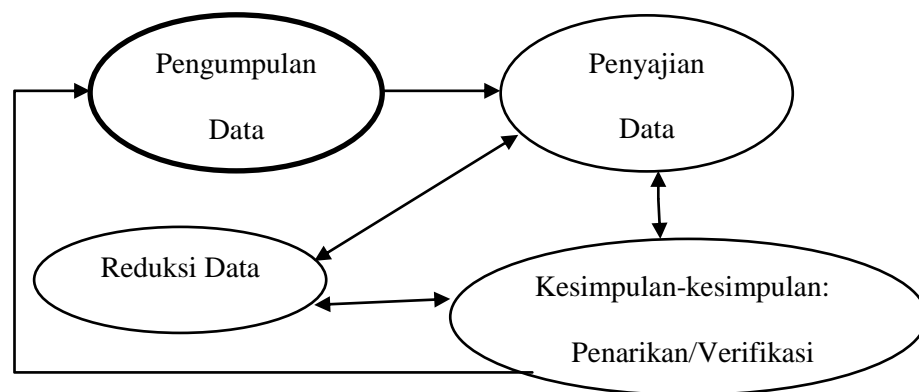
Analisis data menurut Bogdan yaitu:

”Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.” (Sugiyono,2006:244).

Data kualitatif dalam analisisnya dapat dilakukan dengan analisis kualitatif diskriptif melalui model interaktif yang dikembangkan Miles dan

Huberman (1984:20). Analisis data dalam model ini terdiri atas empat komponen yang saling berinteraksi, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Keempat komponen tersebut merupakan siklus yang berlangsung secara terus menerus yakni antara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.



**Gambar 3.1**  
**Komponen Dalam Analisis Data Miles and Huberman (1984)**

Langkah-langkah analisis data model interaktif ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*data collection*)

Data-data yang diperoleh di lapangan dicatat dalam bentuk deskriptif apa adanya, tanpa adanya komentar peneliti dalam bentuk catatan-catatan kecil (*field notes*). Dari catatan-catatan diskripsi ini, kemudian dibuat catatan refleksi, yaitu catatan yang berisi komentar,

pendapat atau penafsiran peneliti atas fenomena yang ditemui di lapangan.

## 2. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data dilakukan terus menerus selama penelitian dilaksanakan. Reduksi data merupakan wujud analisis yang menajamkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya dibuat ringkasan, pengkodean, penelusuran tema-tema, membuat catatan kecil yang dirasakan penting pada kejadian seketika. Kejadian dan kesan tersebut dipilih hanya yang berkaitan dengan tema penelitian.

## 3. Penyajian Data (*data display*)

Pada tahapan ini disajikan data hasil temuan di lapangan dalam bentuk teks naratif, yaitu uraian verbal tentang tema penelitian. Setelah data terfokus dan dispesifikasikan, penyajian data berupa laporan dibuat. Tetapi bila data yang disajikan perlu direduksi lagi, maka reduksi dapat dilakukan kembali guna mendapatkan informasi yang lebih sesuai dengan tema penelitian. Setelah itu data disederhanakan dan disusun secara sistematis tentang hal-hal yang dapat memberi gambaran sesuai dengan tema penelitian.



#### 4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion and verification*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan upaya mencari makna dari komponen-komponen data yang disajikan dengan mencermati pola-pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi dan hubungan sebab-akibat. Dalam melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi selalu dilakukan peninjauan terhadap penyajian data dan catatan di lapangan melalui diskusi dengan teman sejawat, atau orang yang mengerti tentang kompetensi guru dan arahan pembimbing (Sumber: Miles & Huberman, 1992: 17).

### 3.8 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian direncanakan selama bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Juni 2017 dengan rincian jadwal penelitian sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Rencana Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian**

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan												
	Tahun 2014-2017												
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
Pengajuan Judul													
Proses Bimbingan Proposal													
Observasi Awal													
Penyusunan Proposal													
Seminar Proposal													
Revisi Proposal													
Penyusunan Bab I-V													
Bimbingan dan Revisi Bab I-V													
Sidang Skripsi													
Revisi Skripsi													
Penyerahan Skripsi													

*Sumber : Hasil Olahan Penulis 2017.*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Obyek Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Majasari dan Keadaan Geografis**

Wilayah Kecamatan Majasari secara geografis terletak antara  $6^{\circ}17'32''$ - $6^{\circ}20'36''$  lintang selatan dan  $106^{\circ}03'52''$ -  $106^{\circ}06'300''$  Bujur timur dengan luas daerah  $20,09 \text{ km}^2$  atau sebesar 0.73% dari luas Kabupaten Pandeglang. Kelurahan Karaton merupakan kelurahan terkecil dengan luas  $1,91 \text{ km}^2$ , sedangkan Kelurahan Pagerbatu merupakan kelurahan terbesar dengan luas  $5,56 \text{ km}^2$ . Bentuk topografi wilayah Kecamatan Majasari sebagian merupakan dataran yaitu di wilayah Kelurahan Sukaratu, Kelurahan Karaton dan Kelurahan Saruni, sedangkan di Kelurahan Cilaja dan Kelurahan Pagerbatu merupakan kawasan lereng. Ketinggian wilayah Kecamatan Majasari rata-rata dibawah 500 m di permukaan laut (dpl).

**Tabel 4.1****Luas wilayah kelurahan di Kecamatan Majasari**

<b>Kelurahan</b>	<b>Luas (KM<sup>2</sup>)</b>	<b>Presentase (%)</b>
Sukaratu	4,27	21,25
Karaton	1,91	9,51
Cilaja	4,26	21,2
Saruni	4,09	20,36
Pagerbatu	5,56	27,68
<b>JUMLAH</b>	<b>20,09</b>	<b>100</b>

Sumber : Monografi Kecamatan Majasari, 2015

Tabel 4.1 menunjukkan luas wilayah (dalam KM<sup>2</sup>) Kelurahan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang, dari table tersebut wilayah yang paling luas adalah Kelurahan Sukaratu dengan luas wilayah 4,27 KM.

**Tabel 4.2****Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Majasari**

<b>Kelurahan</b>	<b>Utara</b>	<b>Selatan</b>
Sukaratu	Kel. Saruni	Kec. Banjar
Karaton	Kec. Pandeglang	Kel. Sukaratu
Cilaja	Kec. Pandeglang/Kec. Karangtanjung	Kel. Saruni
Saruni	Kel. Pagerbatu	Kec. Kaduhejo
Pagerbatu	Kec. Cadasari	Kel. Saruni

Sumber : Monografi Kecamatan Majasari, 2015

Tabel 4.2 menunjukkan batas wilayah kelurahan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang,

**Tabel Lanjutan**

<b>Kelurahan</b>	<b>Barat</b>	<b>Timur</b>
Sukaratu	Kec. Kaduhejo	Kel. Karaton/Kec. Pandeglang
Karaton	Kel. Cilaja	Kec. Pandeglang
Cilaja	Kel. Pagerbatu	Kel. Karaton
Saruni	Kec. Kaduhejo	Kel. Cilaja/Kel. Karaton
Pagerbatu	Kec. Kaduhejo	Kel. Cilaja

Sumber : Monografi Kecamatan Majasari, 2015

#### **4.1.1.1 Pemerintahan**

Kecamatan Majasari merupakan kecamatan baru yang dibentuk pada tanggal 17 Juli 2007 dengan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No.26 Tahun 2007 dan merupakan pemekaran dari Kecamatan Pandeglang. Secara administrasi Kecamatan Majasari terdiri dari 5 Kelurahan, 53 rukun warga (RW) dan 178 rukun tetangga (RT).

#### **4.1.1.2 Penduduk**

Penduduk Kecamatan Majasari pada tahun 2009 tercatat sebanyak 44.714 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 23.017 jiwa dan perempuan 21.697 jia. Jumlah rumah tangga sebanyak 9.987 rumah tangga dengan kepadatan penduduk sebesar 2.501 jiwa per km<sup>2</sup> dengan sex ratio sebesar 106,08 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Majasari terdapat 106 sampai dengan 107 penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kecamatan Majasari sebanyak 28.111 jiwa, terdiri atas 14.476 jiwa laki-laki dan 13.635 jiwa perempuan. Sementara itu, jumlah penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan >65 tahun) tercatat sebanyak 16.603 jiwa, terdiri atas 8.541 jiwa laki-laki dan 8.602 jiwa perempuan. Dari data tersebut diperoleh angka beban tanggungan sebesar 59,06 artinya dari setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung beban 59 sampai 60 penduduk usia tidak produktif.

#### **4.1.1.3 Sosial dan Budaya**

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah cukup tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Merujuk pada amanat UUD 1945 beserta amandemennya (pasal 31 ayat 2), maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk Indonesia. Peningkatan SDM saat ini lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengesep pendidikan, terutama kelompok usia sekolah (umur 7-24 tahun).

Pada tahun 2009 jumlah sekolah TK/RA di Kecamatan Majasari berjumlah 21 unit, sekolah SD sederajat sebanyak 29 unit, SMP sederajat sebanyak 7 unit dan sekolah SMA sederajat sebanyak 9 unit. Rasio murid-guru pada tahun 2009 untuk sekolah TK dan RA sebesar 6,43 yang berarti setiap seorang guru TK/RA menangani 6-7 siswa. Sedangkan rasio murid-guru untuk

sekolah SD/MI sederajat sebesar 17,85, sekolah SMP/MTs sederajat sebesar 12,44 dan sekolah SMA/SMK/MA sederajat sebesar 25,58.

#### **4.1.1.4 Kesehatan**

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Keberhasilan pembangunan kesehatan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pembangunan kesehatan ini paling tidak tercermin dari deklarasi *Millenium Development Goals* (MDGs), dimana lebih dari sepertiga indikatornya menyangkut bidang kesehatan. Jumlah puskesmas umum dan puskesmas pembantu di Kecamatan Majasari dalam kurun waktu dua tahun terakhir tidak mengalami perubahan yaitu masing-masing sebanyak 1 unit puskesmas umum yang berlokasi Kelurahan saruni dan 2 unit Pustu yang berlokasi di Kelurahan Sukaratu dan Kelurahan Pagerbatu.

#### **4.1.1.5 Produksi**

Dalam struktur perekonomian Kabupaten Pandeglang, sektor pertanian merupakan sektor dominan tak terkecuali di Kecamatan Majasari. Hal ini dapat ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian, yaitu untuk tegal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta dan sawah.

#### 4.1.2 Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) adalah program pemberdayaan masyarakat miskin yang digulirkan oleh pemerintah melalui Departemen Sosial dalam bentuk usaha ekonomi produktif dengan menggunakan pendekatan kelompok, dengan sasaran untuk meningkatkan usaha kelompok produktif, menyediakan sebagian kebutuhan yang diperlukan bagi keluarga tidak mampu, menciptakan keharmonisan hubungan sosial antar warga, menyelesaikan masalah sosial yang dirasakan keluarga tidak mampu, pengembangan diri dan sebagai wadah berbagi pengalaman antar anggota. Pendekatan melalui KUBE ini merupakan identitas Departemen Sosial dalam penanggulangan kemiskinan. Program pemberdayaan masyarakat miskin yang menjadi fokus kajian penulis dalam hal ini adalah program pemberdayaan sosial masyarakat miskin melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Berdasarkan pedoman umum pelaksanaan program pemberdayaan sosial Departemen Sosial RI Tahun 2009, pemberdayaan sosial masyarakat miskin dilakukan melalui pendekatan KUBE dengan alasan :

*Pertama*, dengan sistem KUBE kegiatan usaha yang tadinya dilakukan secara sendiri-sendiri kemudian dikembangkan dalam kelompok, sehingga akan memudahkan dalam pembinaan dan monitoring serta pembinaannya akan lebih efektif dan efisien baik dari segi biaya, tenaga, dan waktu yang digunakan. *Kedua*, dengan pembinaan melalui KUBE diharapkan kelompok



ini akan saling membantu satu sama lain antara yang lemah dengan yang lebih mampu, baik dalam kemampuan, keterampilan, modal dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan KUBE. *Ketiga*, diharapkan dengan KUBE dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, rasa kepedulian, dan kesetiakawanan sosial, baik antar warga binaan sosial maupun kepada masyarakat secara luas karena mereka hidup dalam kelompok dan *Keempat*, KUBE dapat berfungsi menggerakkan keswadayaan, menguatkan dan mengembangkan usaha anggota, wadah pembinaan sosial, ekonomi dan budaya.

Pelaksanaan program KUBE sebagai salah satu instrumen dari program pemberdayaan sosial masyarakat miskin yang memang sudah berjalan sejak tahun 1980-an. KUBE ini merupakan kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan program kesejahteraan sosial untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial mereka (*Depsos RI, 2008*).

#### **4.1.2.1 Sasaran KUBE**

Sasaran PROKESOS dalam kaitan dengan kebijakan MPMK adalah PMKS yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan rincian sebagai berikut :

1. Keluarga Fakir Miskin yang dibina melalui Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir miskin
2. Kelompok Masyarakat Terasing yang dibina melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing.
3. Para Penyandang Cacat yang dibina melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
4. Lanjut Usia yang dibina melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
5. Anak Terlantar yang dibina melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar
6. Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang dibina melalui Program Peningkatan Peranan Wanita di Bidang Kesejahteraan Sosial
7. Keluarga Muda Mandiri yang dibina melalui Program Pembinaan Keluarga Muda Mandiri
8. Remaja dan Pemuda yang dibina melalui Program Pembinaan Karang Taruna Keluarga Miskin di Daerah Kumuh yang dibina melalui Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).

#### **4.1.2.2 Proses Pembentukan KUBE**

Selain KUBE yang ditumbuhkembangkan melalui Program Bantuan Kesejahteraan Fakir Miskin, langkah / kegiatan pokok pembentukan KUBE untuk sasaran PMKS lainnya adalah :

1. Pelatihan ketrampilan berusaha, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan praktis berusaha yang disesuaikan dengan minat dan ketrampilan PMKS serta kondisi wilayah, termasuk kemungkinan pemasaran dan pengembangan bisnis usahanya. Nilai tambah lain dari pelatihan adalah tumbuhnya rasa percaya diri dan harga diri PMKS untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan memperbaiki kondisi kehidupannya
2. Pemberian bantuan stimulan sebagai modal kerja atau berusaha yang disesuaikan dengan ketrampilan PMKS dan kondisi setempat. Bantuan ini merupakan hibah (bukan pinjaman atau kredit) akan tetapi diharapkan bagi PMKS penerima bantuan untuk mengembangkan dan menggulirkan kepada warga masyarakat lain yang perlu dibantu
3. Pendampingan, mempunyai peran sangat penting bagi berhasil dan berkembangnya KUBE, mengingat sebagian besar PMKS merupakan kelompok yang paling miskin dan penduduk miskin. Secara fungsional pendampingan dilaksanakan oleh PSK yang dibantu oleh infrastruktur kesejahteraan sosial di daerah seperti Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS) dan Panitia Pemimpin Usaha Kesejahteraan Sosial (WPUKS).

#### 4.1.2.3 Organisasi dan Manajemen

##### 1. Kepengurusan KUBE

- Pada hakekatnya KUBE dibentuk dari, oleh dan untuk anggota kelompok
- Pengurus KUBE dipilih dari anggota kelompok yang mau dan mampu mendukung pengembangan KUBE, memiliki kualitas seperti kesediaan mengabdikan, rasa keterpanggilan, mampu mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, mempunyai keuletan, pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta yang penting adalah merupakan hasil pilihan dari anggotanya

##### 2 Keanggotaan KUBE

- Anggota KUBE adalah PMKS sebagai sasaran program yang telah disiapkan. Jumlah anggota untuk setiap KUBE berkisar antara 5 sampai 10 orang / KK sesuai dengan jenis PMKS
- Khusus untuk Pembinaan Masyarakat Terasing dan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh pembentukan KUBE berdasarkan unit pemukiman sosial, artinya suatu unit pemukiman sosial adalah satu KUBE

##### 3. Administrasi KUBE

- Untuk dapat berjalan dan berkembangnya KUBE dengan baik, maka pengurus maupun pengelola KUBE perlu memiliki catatan atau

administrasi yang baik, yang mengatur keanggotaan, organisasi, kegiatan, keuangan, pembukuan dan lain sebagainya.

- Catatan dan administrasi KUBE meliputi antara lain buku anggota, buku peraturan KUBE, pembukuan keuangan / pengelolaan hasil, daftar pengurus dan sebagainya

#### **4.1.2.4 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi**

1. Pembinaan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penumbuhan dan pengembangan KUBE, disamping meningkatkan motivasi dan kemampuan pelaksanaan dilapangan serta kapasitas manajemen pengelola KUBE. Pembinaan dilaksanakan oleh petugas sosial wilayah mulai dan tingkat propinsi, kabupaten / kodya, kecamatan dan desa / kelurahan secara berjenjang
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan KUBE dan permasalahan yang merupakan hambatan serta upaya pemecahannya, sehingga upaya penumbuhan dan pengembangan KUBE berjalan sesuai dengan rencana
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi beserta pelaporannya dilaksanakan melalui mekanisme secara berjenjang mulai dan tingkat desa, kecamatan, kabupaten / kodya, provinsi dan pusat dalam koordinasi Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) PROKESRA secara berjenjang.

Pada tahun 2014 di Kabupaten Pandeglang terdapat 186 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Pandeglang, salah satu daerah yang menerima bantuan program Kelompok Usaha Bersama ini yaitu Kecamatan Majasari dengan jumlah Kelompok Usaha Bersama sebanyak 10 kelompok yang terbagi di dua kelurahan (*Disnakertransos Kab. Pandeglang*).

Kelurahan Cilaja dan Kelurahan Pager Batu merupakan 2 (dua) Kelurahan di Kecamatan Majasari yang mendapatkan program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan komposisi 5 (lima) kelompok KUBE di Kelurahan Cilaja dan 5 (lima) kelompok KUBE di Kelurahan Pager Batu.

**Tabel 4.3**  
**Nama KUBE di Kecamatan Majasari**

No	Nama KUBE	Alamat KUBE	Jenis Usaha
1	Rukun Mandiri 1	Kp. Soreah RT.02 RW.05	Makanan Ranginging
2	Rukun Mandiri 2	Kp. Soreah RT.02 RW.05	Ternak Kambing
3	Rukun Mandiri 3	Kp. Cengkel RT. 02 RW.04	Pertanian
4	Rukun Mandiri 4	Kp. Pasir Bunut RT.06 RW.04	Ternak Kambing
5	Rukun Mandiri 5	Kp. Cibeunying RT.02 RW03	Ternak Ayam Kampung
6	Campurak 1	Kp. Campuraksanta RT.03 RW.07	Ternak Kambing
7	Gunung Nyekcelek	Kp. Selagunung RT.01 RW.07	Makanan Ringan dan Ranginging
8	Kadu Cagak	Kp. Paku Haji Cagak RT.02 RW.05	Ternak Kambing
9	Bina Tani	Kp. Campuraksanta RT.03 RW.07	Ternak Kambing

10	Limus Harapan	Kp. Paku Haji Girang RT.03 RW.0	Ternak Kambing
----	---------------	---------------------------------	----------------

*Sumber: Pemerintah Kecamatan Majasari 2015.*

Tabel 4.3 menunjukkan nama-nama kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok.

## **4.2 Deskripsi Data**

### **4.2.1 Deskripsi Data Penelitian**

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil observasi penelitian dilapangan. Penelitian mengenai Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Majasari, data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata dan tindakan yang peneliti dapatkan melalui proses wawancara dan observasi berperan serta. Dalam penelitian ini, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat dalam catatan tertulis atau melalui alat perekam yang peneliti gunakan selama proses wawancara berlangsung.

Selain data berupa kata-kata dan tindakan, dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan data-data dan dokumentasi yang berada dilapangan. Dokumentasi tersebut bermacam-macam bentuknya adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan pengamatan berperan serta adalah Profil Kecamatan Majasari.

Adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan pengamatan berperanserta adalah berupa catatan lapangan peneliti dan foto aktivitas orang-orang yang peneliti amati. Alasan peneliti menggunakan data berupa foto adalah karena foto dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah dan menganalisis obyek yang sedang diteliti melalui segi-segi subyektif.

Berikutnya untuk mempertajam analisis data, peneliti menggunakan dimensi penilaian yang mengacu pada teori yang dikemukakan oleh *William N. Dunn*, di antaranya yaitu: efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti menggunakan teknik analisa kualitatif diskriptif melalui model interaktif yang dikembangkan *Miles dan Huberman (1984:20)*. Analisis data dalam model ini terdiri atas empat komponen yang saling berinteraksi, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

#### **4.2.2 Data Informan**

Dalam penelitian Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang pemilihan informan penelitiannya, peneliti menggunakan teknik *Purposive* (sampel bertujuan). Adapun informan-informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian



ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti.

Informan dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. Berikut *stakeholder* yang terlibat dan menjadi objek dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Daftar Informan**

No	Kode Informan	Nama Informan	Status Informan
1	I <sub>1.1</sub>	Bapak Doto Sunardi	Kepala Bidang Bantuan Sosial Dinsos Pandeglang
2	I <sub>1.2</sub>	Bapak Didi Rosadi	Pelaksana Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial Dinsos Pandeglang
3	I <sub>2.1</sub>	Bapak M. Uwes	KASI Pembangunan Kec. Majasari
4	I <sub>2.2</sub>	Bapak R. Dodi Suryadi	KASI Kesejahteraan Sosial Kec. Majasari
5	I <sub>3</sub>	Ibu Sri Permatasari	Pendamping KUBE Kec. Majasari
6	I <sub>4</sub>	Bapak Anwarudin	Pendamping KUBE Kel. Cilaja
7	I <sub>5.1</sub>	Bapak Maksum	Ketua KUBE Rukun Mandiri 3
8	I <sub>5.2</sub>	Bapak Kamsani	Ketua KUBE Rukun Mandiri 5
9	I <sub>5.3</sub>	Ibu Ma'ah	Ketua KUBE Gunung Nyeklek
10	I <sub>5.4</sub>	Bapak Armani	Ketua KUBE Limus Harapan
11	I <sub>6</sub>	Bapak Aning	Tokoh Masyarakat Kelurahan Cilaja

12	I <sub>7</sub>	Ibu Khadijah	Tokoh Masyarakat Kelurahan Pagerbatu
----	----------------	--------------	---

*Sumber : Peneliti, 2017*

Tabel 4.4 menunjukkan nama-nama informan penelitian dalam evaluasi program kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari 11 (sebelas) informan penelitian..

### 4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini mengacu pada metode penelitian kualitatif yang sangat identik dengan wawancara mendalam. Implikasi dari wawancara mendalam yaitu banyaknya informasi yang diperoleh, karena wawancara yang berkembang selama proses observasi, dengan banyaknya informasi yang didapat, maka peneliti mengambil garis besar permasalahan yang relevan dengan kajian teori Evaluasi menurut William N. Dunn (2003:610). Adapun hasil wawancara yang telah dipilih adalah sebagai berikut :

#### 1. Kriteria Efektifitas

Dimensi efektifitas merupakan suatu yang berkaitan dengan target pencapaian tujuan dari usaha-usaha yang dilakukan. Menurut **William N. Dunn** efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan (maksimal), atau mencapai suatu tujuan dari diadakannya tindakan, lepas dari pertimbangan efisiensi. Dalam evaluasi kebijakan publik tentang program kelompok usaha bersama, tingkat keberhasilan pencapaian target program kelompok usaha

bersama serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program KUBE adapapun temuan dilapangannya adalah sebagai berikut :

*Pertama*, pencapaian tingkat keberhasilan target program kelompok usaha bersama (KUBE) dapat menjadi tolak ukur efektivitas dari program KUBE di Kecamatan Majasari terhadap hasil (Akibat) yang diharapkan dari masyarakat penerima bantuan program tersebut. Mengenai aspek ini peneliti menanyakan kepada I.1.1 yang mengatakan bahwa tingkat keberhasilan pencapaian program KUBE bisa dibilang cukup berhasil, sebagaimana yang dikatakan oleh I.1.1 sebagai berikut:

*“Dengan data yang ada, melihat kelompok yang gagal hanya sebanyak 2 (dua) kelompok KUBE saja, ini menunjukkan efektifitas pengelolaan usaha secara kelompok cukup berhasil, karena dari sekian KUBE yang gagal cuma beberapa dan gak semuanya gagal, jadi bisa dibilang program KUBE di Kecamatan Majasari secara umum cukup berhasil”* (Wawancara dengan Bapak Drs. Doto Sunardi, Kepala Bidang Bantuan Sosial : Kamis, 16 April 2015, pukul 10.40)

Sedangkan menurut I.1.2 mengatakan bahwa pencapaian program KUBE sebagai berikut :

*“Tingkat keberhasilan program bisa dilihat dari 3 aspek yaitu aspek Sosial, Ekonomi dan aspek Kelembagaan, kalau aspek kelembagaan beberapa kube secara fungsi organisasi peran ketua dan bendahara sudah berjalan dengan baik, secara aspek ekonomi juga sudah terbangun, misalnya ada beberapa kube dari segi keuntungan usaha alhamdulillah sudah cukup merasakan hasil, tetapi dari aspek sosial yang masih kurang berhasil, jadi secara presentase*

*bisa disebut 70% tingkat keberhasilan program KUBE di Kecamatan Majasari.” (Wawancara dengan Bapak Didi Rosadi, Pelaksana Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial : Selasa, 21 April 2015, pukul 09.15)*

Dari kedua pernyataan diatas, dalam bidang tertentu seperti aspek sosial masyarakat penerima bantuan masih belum ada peningkatan sementara dalam hal kelembagaan dan hal ekonomi ada pencapaian yang cukup memuaskan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan dari program KUBE dalam tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat penerima bantuan cukup berhasil,

Sementara menurut I<sub>2.1</sub> mengatakan hal yang berbeda bahwa pencapaian keberhasilan program KUBE sudah baik, dengan mengatakan sebagai berikut :

*“Menurut saya keberhasilan KUBE di Kecamatan Majasari mencapai 98% dikarenakan yang aktif 8 kelompok dan tidak aktif hanya 2 kelompok saja. Keberhasilan pencapaian ditingkat kecamatan itu bisa dilihat dari masyarakatnya, jika masyarakat penerima bantuan sudah tertib administrasi, maka bisa dikatakan program itu sukses, selain itu kegiatan kube itu harus ada pemantaunya, pemantau tetap diadakan oleh pelaksana yang dilakukan oleh bu Sri (pembimbing KUBE Kecamatan) dia tetap pendamping, apapun bentuknya di KUBE itu tetap dia yang membuat laporan”. (Wawancara dengan Bapak M. Uwes, KASI Pembangunan Kec. Majasari : Senin, 13 April 2015, pukul 10.30)*

Analisa peneliti dari pernyataan I<sub>2.1</sub> diatas sangat berbeda dengan yang peneliti temui dilapangan, karena kenyataannya ada sebagian KUBE yang sudah merintis usahanya sejak awal menerima bantuan sampai sekarang belum bisa merasakan keuntungan dari usaha yang mereka geluti. Hal lain yang peneliti temukan dilapangan terkait masalah tertib administrasi yaitu sebagian KUBE yang berusaha

dibidang ternak kambing tidak memiliki bentuk laporan kegiatan yang mendetail, ini menyebabkan segala kegiatan usaha tidak dicatat dengan baik oleh masing-masing kelompok.

Selanjutnya pernyataan 1.2.2 mengenai keberhasilan pencapaian program KUBE sebagai berikut :

*Kalo itu sekitar 70% tingkat berhasilnya, karena kami juga sering memantau ke lapangan untuk melihat kegiatan usaha KUBE, kube betul-betul dikelola oleh masyarakat penerima bantuan, tidak ada data-data fiktif atau memanipulasi data oleh masyarakat penerima bantuan. (Wawancara dengan Bapak R. Dodi Suryadi, KASI Kessos Kec. Majasari : Senin, 13 April 2015, pukul 11.02)*

Sedangkan menurut (I<sub>3</sub>) mengatakan bahwa :

*Pencapaian bagus, cukup memuaskan Cuma karena masalah pendidikan yang rata-rata lulusan SD malahan ada yang tidak tamat Sekolah Dasar sama sekali dan masalah internal dan mungkin basic nya dia bukan dibidang usaha yang digeluti sehingga mengelola usahanya tidak maksimal. (Wawancara dengan Ibu Sri Permatasari, Pendamping KUBE Kec. Majasari : Senin, 13 April 2015, pukul 10.30)*

Pada pernyataan diatas dapat dilihat bahwa menurut Ibu Sri Permatasari pencapaian secara keseluruhan dari program kelompok usaha bersama cukup memuaskan, pernyataan ini didukung oleh Pak M. Uwes Selaku KASI Pembangunan Kecamatan Majasari yang menrangkan bahwa tingkat keberhasilan mencapai 70 %, hal ini dikarenakan sering dilakukannya monitoring oleh pihak kecamatan untuk

langsung memantau kelapangan melihat kegiatan usaha KUBE di Kecamatan Majasari.

*Kedua*, hambatan yang menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan usaha KUBE di Kecamatan Majasari. Berikut pernyataan I.1.1 terkait hal ini :

*“Hambatannya yaitu kebanyakan dari mereka tidak menjadikan KUBE sebagai usaha utama, karena mereka memilih usaha yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa merasakan keuntungan seperti ternak kambing, ternak ayam dan pertanian sehingga ya memang untuk sehari-hari gak bisa diandalkan karena kambing itu hasilnya sekian bulan/tahun baru bisa dipanen.”* (Wawancara dengan Bapak Drs. Doto Sunardi, Kepala Bidang Bantuan Sosial : Kamis, 16 April 2015, pukul 10.40)

Pada pernyataan diatas dapat terlihat bahwa menurut Bapak Doto Sunardi masalah yang menghambat program KUBE dalam mencapai tujuannya meningkatkan taraf hidup masyarakat penerima bantuan yaitu kesalahan awal dalam pemilihan jenis usaha yang akan dirintis sehingga kebanyakan masyarakat penerima bantuan tidak menjadikan KUBE itu sebagai usaha inti.

Hal yang berbeda diutarakan oleh I.1.2 dimana menurut Bapak Didi hambatan utama dari pelaksanaan program KUBE di Kecamatan Majasari ini adalah karena terkendala jenis usaha yang dipilih oleh kelompok KUBE dan Dinas tidak diperbolehkan memberi usulan jenis usaha, adapun pernyataannya sebagai berikut :

*“Sebetulnya untuk jenis usaha kita tidak bisa mengintervensi, itu disesuaikan dengan potensi daerah dan potensi kelompok, kalo kita (dinas) hanya*

*memberikan motivasi usaha biar kelompok tidak jenuh dalam mengelola usahanya, tapi karena keinginan kelompok seperti itu kita tidak memaksakan harus usaha lain.”* (Wawancara dengan Bapak Didi Rosadi, Pelaksana Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial : Selasa, 21 April 2015, pukul 09.15)

Dari kedua pernyataan tersebut, hambatan utama dalam program KUBE ini yaitu pemilihan jenis usaha yang digeluti oleh masyarakat penerima bantuan KUBE tidak disesuaikan dengan tujuan awal dari program ini yaitu meningkatkan pendapatan dan penghasilan dari para anggotanya, sehingga masyarakat penerima bantuan tidak mengalami perubahan kondisi secara ekonomi.

## **2. Kriteria Efisiensi**

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

Efisiensi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menghasilkan target pencapaian tujuan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan sehingga suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, berkaitan dengan usaha yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang dan para pemangku kebijakan dalam pelaksanaan program KUBE.

*Pertama*, usaha yang dilakukan Dinsos untuk meningkatkan pelaksanaan program KUBE khususnya di Kecamatan Majasari, terkait hal ini pernyataan I.1.1, sebagai berikut :

*“Adapun upaya dari kita kalau KUBE itu berkembang kita kasih dana stimulan dan memberikan penyuluhan (motivasi) dibidang jenis usaha yang mereka geluti, misalkan untuk jenis usaha ternak kambing penyuluhannya kita tidak bisa langsung, yang harus ngasih penyuluhan yaitu dinas perternakan sehingga antara satu dinas dengan dinas lain harus bersinergi,”* (Wawancara dengan Bapak Drs. Doto Sunardi, Kepala Bidang Bantuan Sosial : Kamis, 16 April 2015, pukul 10.40)

Hal yang serupa juga dikemukakan dari pernyataan I.1.2, sebagai berikut :

*“Kita mengadakan bimbingan lanjutan, kita undang stakeholder dan pihak-pihak terkait, klo misalnya usaha perternakan kita mengundang dinas peternakan agar memberikan teknik-teknik perternakan yang baik sementara usaha dibidang pertanian kita mengundang dinas pertanian agar memberikan motivasi pertanian kepada kube dalam menjalankan usaha pertanian.”* (Wawancara dengan Bapak Didi Rosadi, Pelaksana Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial : Selasa, 21 April 2015, pukul 09.15)

Dari kedua pernyataan diatas menyatakan bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang selama ini di Kecamatan Majasari adalah dengan melakukan monitoring dan bimbingan lanjutan serta mengundang *stakeholder* untuk bersinergi, hal lain yaitu memberikan dana stimulan kepada KUBE yang berkembang sehingga dengan upaya ini diharapkan KUBE itu bisa lebih termotivasi dan jauh lebih berkembang lagi.



Sementara usaha yang dilakukan pihak Pendamping KUBE Kecamatan Majasari terkait program KUBE dapat diperjelas dari pernyataan I<sub>3</sub> sebagai berikut :

*“Kami sering memonitoring kelapangan, lalu mengecek bagaimana perkembangan kelompok KUBE yang di Kelurahan Cilaja maupun Kelurahan Pager Batu supaya para anggota penerima bantuan ini merasa diperhatikan dalam mengelola kegiatannya.”* (Wawancara dengan Ibu Sri Permatasari, Pendamping KUBE Kec. Majasari : Senin, 13 April 2015, pukul 10.30)

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Pembimbing Kelurahan Cilaja, adapun pernyataan I<sub>4</sub> sebagai berikut :

*“Untuk monitoring sering dilakukan oleh pendamping KUBE Kecamatan, bahkan sesekali ada yang dari Dinsos Pandeglang yang mengecek langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana perkembangan KUBE di Kecamatan Majasari”* (Wawancara dengan Bapak Anwarudin, Pendamping KUBE Kelurahan Cilaja : Selasa, 14 April 2015, pukul 10.45)

Dari dua pernyataan tersebut monitoring merupakan upaya konkret yang dilakukan oleh Pendamping KUBE Kecamatan dan Pendamping KUBE Kelurahan untuk memantau para anggota KUBE dalam mengelola jenis usahanya.

Hal berbeda dinyatakan oleh setiap KUBE, dimana upaya dalam meningkatkan usahanya antara satu dengan yang lain berbeda, ini karena jenis usaha yang mereka pilih berbeda antara satu dengan yang lainnya, seperti yang dijelaskan oleh I<sub>5.3</sub> dimana beliau menyatakan :

*“Untuk meningkatkan kualitas industri, seperti bagaimana cara packing yang baik, kualitas makanan juga minta ditingkatkan seperti dengan cara memberikan varian rasa yang berbeda, tapi ya masyarakat susah untuk mengikuti saran yang diberikan oleh pembimbing kube karena masyarakat merasa dengan keadaan hasil produksi yang sekarang sudah cukup berhasil untuk dijual. Mungkin cara pemasarannya belum bisa.”* (Wawancara dengan Ibu Ma’ah, Ketua KUBE Gunung Nyekclek : Rabu, 06 Maret 2015, pukul 14.01)

Dari pernyataan oleh Ibu Ma’ah menjelaskan bahwa masyarakat penerima bantuan KUBE pada dasarnya sulit untuk mengikuti instruksi yang diberikan oleh pembimbing dalam upaya untuk meningkatkan kualitas produksi makanan, masyarakat menganggap bahwa dengan keadaan produksi yang sekarang sudah cukup berhasil untuk dipasarkan.

Adapun pernyataan lain dari jenis usaha yang berbeda yaitu dinyatakan oleh I.5.1 dimana menurut Bapak Maksu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan usahanya yaitu:

*“Kedepannya berusaha bagaimana masyarakat yang anggota kelompok saya kalau lagi kerja seharusnya bersama-sama dan inisiatif sendiri menanyakan ke ketua kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan kapan kegiatan itu dilaksanakan, jangan hanya pas panen saja turun ke lahan semuanya”* (Wawancara dengan Bapak Maksu, Ketua KUBE Rukun Mandiri 3 : Kamis, 07 Maret 2015, pukul 15.05)

Dilihat dari pernyataan diatas bahwa sebenarnya upaya maksimal untuk meningkatkan kegiatan usaha yang digeluti oleh KUBE Rukun Mandiri 3 ini sudah

dilakukan dari pertama kali program ini dilaksanakan, hanya saja permasalahan individu anggota kelompok yang kurang inisiatif dalam mengelola usaha Pertanian ini menjadikan seperti jalan ditempat.

Dari kedua pernyataan diatas penulis menganalisis bahwa upaya dan usaha yang dilakukan oleh kedua anggota untuk meningkatkan kegiatan usaha yang dugeluti sudah maksimal, hal ini menunjukkan setiap ketua kelompok ingin memberikan usaha yang terbaik guna terciptanya tujuan utama KUBE yaitu membentuk rasa persatuan kegotong-royongan dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat penerimanya.

### **3. Kriteria Kecukupan**

Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kecukupan, merupakan sejauhmana suatu kebijakan tersebut dalam pencapaian target dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Program KUBE sejatinya adalah untuk meningkatkan rasa kebersamaan diantara anggota kelompoknya, sehingga dengan adanya program ini tingkat kebersamaan dan kegotong-royongan antara masyarakat bisa lebih baik lagi. Adapun tingkat kecukupan bisa dilihat dari segi dana yang digulirkan, apakah sebenarnya dana yang diberikan jumlahnya sudah bisa mencukupi kebutuhan para penerima

bantuan program ini, berikut pernyataan mengenai dana program KUBE di Kecamatan Majasari yang ditegaskan oleh I<sub>1.1</sub> :

*Berbicara masalah dana, Kalo disebut cukup gimana ya? memang targetnya segitu, itukan berdasarkan SK, kebetulan program KUBE ini berdasarkan SK APBD1, jadi yang menentukan bukan dari kami, menurut saya, untuk jenis usaha ternak kambing dengan bantuan sebesar 20 juta itu cukup lah dan untuk usaha pertanian juga lebih dari cukup. (Wawancara dengan Bapak Drs. Doto Sunardi, Kepala Bidang Bantuan Sosial : Kamis, 16 April 2015, pukul 10.40)*

Hal yang hampir sama juga diutarakan I<sub>1.2</sub> sebagai berikut :

*Kalo berbicara cukup atau tidak ya relatif, tapi selama ini dengan bantuan sebesar 20 juta kita lihat ada beberapa KUBE yang alhamdulillah berkembang dengan modal sebesar itu terutama KUBE-KUBE yang perguliran dana usahanya ini tidak terlalu lama. (Wawancara dengan Bapak Didi Rosadi, Pelaksana Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial : Selasa, 21 April 2015, pukul 09.15)*

Dari kedua pernyataan diatas, penulis menganalisis bahwa sebenarnya jumlah dana yang bergulir sudah mencukupi dengan yang dibutuhkan oleh para anggota penerima bantuan program KUBE namun itu tergantung dari jenis usaha yang akan dikembangkan, karena ada sebagian kelompok dengan jenis usaha tertentu memang membutuhkan dana yang besar, seperti jenis usaha ternak ayam dan ternak kambing.

Sedangkan menurut I<sub>2.1</sub> beliau mengatakan :

*“Menurut saya ya tergantung kebutuhan KUBE, kalau KUBE meningkat maka otomatis dana tersebut tidak mencukupi, dikarenakan apa, uang itu kan mengalami perputaran, dia semakin besar maka semakin membutuhkan dana yang besar semakin kecil dia membutuhkan dana tersebut kecil, jadi ya sesuai pemanfaatan. Jadi klo istilahnya pemanfaatan dana intinya saya rasa kurang kalo istilahnya pencapaian target kalo yang KUBEnya maju itu lebih kurang lagi dia kan membutuhkan dana yang besar apalagi kan sasarannya ke tiap-tiap individu dengan tujuan peningkatan ekonomi di setiap anggotanya.”* (Wawancara dengan Bapak M. Uwes, KASI Pembangunan Kec. Majasari : Senin, 13 April 2015, pukul 10.30)

Hal yang berbeda dikatan oleh I.2.2 terkait hal ini yaitu:

*“Jumlah dana dari pemerintah bapak rasa Belum mencukupi, dikarenakan penjualan maupun hasil masih dalam taraf proses, proses perkembangan dan proses produksi dalam tahap ini belum memadai. Sehingga dana yang bergulir jumlahnya belum cukup.”* (Wawancara dengan Bapak R. Dodi Suryadi, KASI Kessos Kec. Majasari : Senin, 13 April 2015, pukul 11.02)

Terlihat dari kedua pernyataan *staff* kecamatan diatas beranggapan bahwa jumlah dana yang bergulir sekarang ini bisa dibilang belum mencukupi dengan kebutuhan masyarakat penerima bantuan program KUBE, hal ini terlihat dari pernyataan Bapak Dodi yang mengatakan bahwa jumlah dana yang diberikan belum cukup dimana hasil dari usaha yang mereka geluti tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan.

#### 4. Perataan

Perataan adalah suatu kriteria untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pada pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut menghasilkan lebih banyak distribusi yang adil atau wajar terhadap risorsis yang ada dalam masyarakat.

Perataan merupakan konsekuensi adanya kebijakan yang telah dibuat, apakah hasil kebijakan sudah disosialisasikan dan menjadi bagian program KUBE yaitu dengan memperhatikan elemen-elemen masyarakat sebagai objek penerima bantuan KUBE di Kecamatan Majasari.

*Pertama*, dari segi perataan manfaat dari program KUBE menurut I<sub>4</sub> terkait hal ini beliau mengatakan :

*“Karena berangkat dari kelompok, pengelolaan juga berdasarkan kelompok serta keberhasilan dan kegagalan juga ditanggung kelompok saya rasa mereka sangat merasakan terutama dalam hal pertanggungjawabannya kalo hasil ya relatif, tapi saya sangat merasakan apalagi tanggung jawab moralnya, terutama kube yang masih berjalan.”* (Wawancara dengan Bapak Anwarudin, Pendamping KUBE Kelurahan Cilaja : Selasa, 14 April 2015, pukul 10.45)

Dari pernyataan diatas dapat terlihat bahwa sebenarnya perataan dari segi manfaat bisa dirasakan oleh anggota kelompok, karena pada dasarnya program ini beranjak dari kelompok, mulai dari pembentukan, pengelolaan dan pertanggung jawaban usaha

kelompok lah yang dominan mengelola., hal lain terkait perataan segi manfaat diperkuat dari pernyataan I.5.3 yaitu sebagai berikut :

*“Alhamdulillah menurut saya manfaat bisa dirasakan merata oleh kelompok, jadi bisa membuat sendiri dirumah membantu perekonomian manfaatnya banyak.”* (Wawancara dengan Ibu Ma’ah, Ketua KUBE Gunung Nyekclek : Rabu, 06 Maret 2015, pukul 14.01)

Pernyataan diatas menyatakan bahwa manfaat dari program usaha melalui KUBE sudah dirasakan merata oleh setiap anggota penerima bantuannya, ini bisa dilihat dari pernyataan yang menyebutkan program KUBE membantu perekonomian dan mempunyai banyak manfaat.

Hal yang berbeda menjelaskan tentang perataan manfaat program KUBE ini diutarakan oleh I.5.1 yaitu sebagai berikut :

*“Secara ekonomi terasa walaupun hasilnya sedikit, secara soaiial juga kebangun seperti gotong-royong dan kebersamaan. Cuma secara kelembagaan belum terasa karena yang kerja di kelompok ini orangnya itu-itu saja, tapi ya secara keseluruhan alhamdulillah bisa dirasakan merata manfaatnya dari program KUBE ini.”* (Wawancara dengan Bapak Maksum, Ketua KUBE Rukun Mandiri 3 : Kamis, 07 Maret 2015, pukul 15.05)

Dari pernyataan diatas, perataan yang tidak dirasa dalam kelompok usaha yang digeluti oleh KUBE Rukun Mandiri 3 yaitu tentang masalah kelembagaan, beliau mengatakan jika yang bekerja orangnya itu-itu saja, ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya tugas yang diberikan merata kesetiap anggota dilaksanakan dengan baik.

## 5. Responsivitas

Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektivitas, efisiensi, kecukupan kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Responsivitas merupakan adanya hubungan interaksi sosial, sehingga memudahkan dalam melakukan kegiatan mengelola usaha yang dijalani oleh setiap kelompok KUBE. Peran serta masyarakat dalam membantu atau mengawasi kegiatan serta mengetahui betul akan adanya program KUBE merupakan upaya yang harus dibangun dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini.

*Pertama*, hal yang menandakan adanya tanggapan yang baik antara masyarakat penerima bantuan dan masyarakat yang tidak menerima bantuan program KUBE seperti yang diutarakan oleh I<sub>4</sub> yaitu sebagai berikut :

*“Masyarakat berterimakasih dengan adanya program ini, karena dengan adanya KUBE ini tingkat kebersamaan sangat meningkat. Walaupun dari segi ekonomi belum dirasakan tetapi dari segi sosial sangat bisa dirasakan.”*

(Wawancara dengan Bapak Anwarudin, Pendamping KUBE Kelurahan Cilaja : Selasa, 14 April 2015, pukul 10.45)

Hal yang serupa juga diutarakan I<sub>3</sub> sebagai berikut :



*“Masyarakat senang hati menerima bantuan KUBE, karena bantuan ini berbentuk hibah, dengan catatan walau tidak ada pengembalian dana ke pemerintah bakal ada sanksi bagi pelanggar program KUBE ini.”*  
 (Wawancara dengan Ibu Sri Permatasari, Pendamping KUBE Kec. Majasari :  
 Senin, 13 April 2015, pukul 10.30)

Dari kedua pernyataan diatas menunjukkan bahwa masyarakat menerima dengan sangat senang hati adanya bantuan program KUBE ini, tingkat kebersamaan antar masyarakat semakin terjalin, sementara hal lain yang dikatakan oleh I menunjukkan adanya masalah kecemburuan sosial pada saat pertama kali program ini turun, seperti yang dikatakan I<sub>4</sub> berikut :

*“Secara keseluruhan setelah masyarakat mengetahui kalau program KUBE ini ditujukan untuk orang2 dibawah garis merah mereka awalnya cenderung timbul rasa cemburu sosial, tetapi setelah tim verifikasi dari provinsi datang kelapangan dan langsung memverifikasi calon penerima bantuan yang layak dan bahkan banyak yang dicoret pas verifikasi masyarakat yang tidak menerima bantuanpun langsung mengerti dan tidak terjadi kecemburuan sosial lagi.”* (Wawancara dengan Bapak Anwarudin, Pendamping KUBE Kelurahan Cilaja : Selasa, 14 April 2015, pukul 10.45)

Sementara menurut I<sub>1,2</sub> terkait hal ini yaitu sebagai berikut :

*“Kalo yang tidak mendapatkan bantuan ini jelas ada kecemburuan sosial, tetapi karena dalam program kube ini kita berbeda dengan dinas lain, maka ada kriteria khusus yang nerimanya, para calon penerima diutamakan dari sisi sosialnya yaitu masyarakat miskin yang tidak mampu”* (Wawancara dengan Bapak Didi Rosadi, Pelaksana Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial : Selasa, 21 April 2015, pukul 09.15)

Dari pernyataan diatas masalah kecemburuan sosial yang sempat mencuat pada saat pertama kali program ini diterima oleh masyarakat sempat membuat beberapa masyarakat yang tidak menerima bantuan program merasa dipandang sebelah mata, namun setelah ada tim dari provinsi yang turun langsung ke Kelurahan Pagerbatu dan Kelurahan Cilaja melakukan verifikasi menjadikan masyarakat yang tidak menerima bantuan menyadari bahwa mereka penerima bantuan yang terdata memang layak menerimanya.

Sementara pendapat masyarakat yang tidak mendapat bantuan terkait hal ini seperti yang diutarakan oleh I<sub>6</sub> yaitu sebagai berikut :

*“Awalnya sih bapak juga cemburu ya,tapi setelah bapak melihat langsung ada orang yang dari provinsi untuk melakukan verifikasi calon penerima bantuan dan bahkan pada saat itu ada anggota yang dicoret karena tidak layak menerima bantuan, ya bapak langsung memahami, jadi sampai sekarang engga jadi masalah, mungkin emang hanya dapat jatah kelompok yang sedikit makanya orang seperti bapak ini belum bisa dimasukan ke kelompok KUBE”.* (Wawancara dengan Bapak Aning, Tokoh Masyarakat Kelurahan Cilaja : Kamis, 22 Januari 2015, pukul 14.40)

Hal yang sama juga diutarakan oleh I<sub>7</sub> adapun pendapat menurut I<sub>7</sub> sebagai berikut :

*“Iya ibu juga sempat merasa kesal hati karena ibu tidak bisa masuk kekelompok KUBE itu, pedahalkan harapan ibu semua warga masyarakat bisa mrasakan ikut kelompok KUBE.karena ibu juga cuma ibu rumah tangga butuh kegiatan lain.”* (Wawancara dengan Ibu Khadijah, Tokoh Masyarakat Kelurahan Pagerbatu : Senin, 13 April 2015, pukul 10.20)

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa sebenarnya masyarakat yang tidak menerima bantuan program masih mengharapkan bisa untuk masuk ke kelompok KUBE, cuma saja dengan keadaan KUBE yang sekarang yang bisa disebut jalan ditempat nampaknya sangat sulit untuk berkembang bahkan sulit untuk merekrut anggota-anggota baru.

## **6. Ketepatan**

Kriteria ketepatan (appropriateness) secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substansif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersamaan.

Ketepatan merupakan adanya ide-ide atau asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut tentang program kelompok usaha bersama (KUBE). Apakah kebijakan dengan mengeluarkan program tersebut sudah memberikan kontribusi yang baik bagi peningkatan taraf hidup masyarakat Kecamatan Majsari khususnya Kelurahan Cilaja dan Kelurahan Pagerbatu.

Pertama, tujuan dari hasil yang akan dirasakan dari program kelompok usaha bersama (KUBE) adalah mampu memberikan peningkatan taraf hidup masyarakat penerimanya serta apakah program kelompok usaha bersama ini merupakan suatu kebijakan yang memang dibutuhkan masyarakat, berikut pernyataan dari I<sub>1.1</sub> mengenai hal ini :

*“Kalau berbicara kebutuhan masyarakat sudah pasti iya, seperti KUBE, PKH dan program lainnya yang diluncurkan pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat, sementara untuk KUBE itu sendiri dilihat dari cara penyaluran bantuan berbentuk dana tunai yang ditunjukkan untuk kelompok, dengan begitu diharapkan bantuan dari pemerintah ini bisa diolah dan dikembangkan oleh masyarakat penerima bantuannya, berbeda dengan bantuan jenis lainnya yang ditunjukkan untuk individu dimana bantuan dana dari pemerintah langsung diberikan ke masing-masing individu sehingga tidak ada usaha untuk mengelola dana yang diberikan.”* (Wawancara dengan Bapak Drs. Doto Sunardi, Kepala Bidang Bantuan Sosial : Kamis, 16 April 2015, pukul 10.40)

Sementara menurut I<sub>1,2</sub> :

*“Selama ini dari tahun 2006 sampai sekarang program KUBE ini masih dijadikan program pavorit dan unggulan dari Kementrian Sosial. Pada tahun 2008 bentuk penyaluran bantuan KUBE berupa barang, setelah adanya evaluasi ternyata kurang pas akhirnya diganti dengan bantuan berbentuk dana tunai.”* (Wawancara dengan Bapak Didi Rosadi, Pelaksana Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial : Selasa, 21 April 2015, pukul 09.15)

Dari kedua pernyataan diatas menjelaskan bahwa sebenarnya program kelompok usaha bersama (KUBE) yang digulirkan pemerintah sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang merupakan suatu kebijakan yang tepat, karena dari segi tujuan utamanya yaitu pembentukan kelompok dimana dana yang bergulir dan diberikan ke kelompok harus dikelola sesuai jenis kegiatan usaha yang dipilih oleh masing-masing kelompok, ini menunjukkan bahwa dengan adanya program ini maka pemerintah memberi jalan supaya masyarakat yang menerima bantuan bisa lebih hidup mandiri

tanpa ketergantungan dengan program-program pemerintah yang sifatnya diberikan kepada individu.

Sementara hal lain yang dikatakan oleh I<sub>2.1</sub> terkait kesesuaian kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, adapun pendapat I<sub>2.1</sub> sebagai berikut :

*“Iya sesuai kebutuhan masyarakat, program ini diharuskan untuk mempermudah komunikasi, klo disatu kelompok kube itukan mudah untuk menyampaikan masalah menyampaikan pendapat jadi apapun bentuknya kalau istilahnya ada ikatan kekeluargaan sehinggadengan adanya program KUBE tingkat kebersamaan masyarakat meningkat, memudahkan ririungan dan gotong royong yang terjalin terus menerus.”* (Wawancara dengan Bapak M. Uwes, KASI Pembangunan Kec. Majasari : Senin, 13 April 2015, pukul 10.30)

Kemudian hal yang hampir serupa juga diutarakan oleh I<sub>2.2</sub> hal yang dituturkan sebagai berikut :

*“Betul kebutuhan masyarakat, karena KUBE itukan kelompok usaha bersama jadi punya masyarakat, bukan punya pemerintah, pemerintah yang memberikan bantuan.”* (Wawancara dengan Bapak R. Dodi Suryadi, KASI Kessos Kec. Majasari : Senin, 13 April 2015, pukul 11.02)

Dari kedua pendapat diatas menunjukkan bahwa program kelompok usaha bersama (KUBE) yang diberikan oleh pemerintah merupakan suatu program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerimanya, dengan adanya program ini tingkat kebersamaan antar masyarakat penerima bantuan semakin meningkat dan bentuk rasa

tanggung jawab masyarakat terhadap dana yang diberikan oleh pemerintah semakin terbangun walaupun tanpa ada bentuk pengembalian kembali kepada pemerintah.

Hal lain yang diutarakan oleh I<sub>4</sub> terkait hal ini sebagai berikut :

*”Menurut saya kalau bentuknya dana tunai untuk pribadi tidak ada pola fikir untuk bagaimana mempertanggungjawabkan dana itu, jadi seenaknya saja menurut saya itu kurang tepat. Tetapi kalo dari KUBE walaupun dari segi ekonomi belum bisa meningkatkan taraf hidup tapi setidaknya ada pola fikir baru yang mereka peroleh, tingkat kebersamaan muncul dan rasa tanggung jawabnya pun ada, jadi KUBE ini merupakan program yang sangat tepat untuk saat ini.”* (Wawancara dengan Bapak Anwarudin, Pendamping KUBE Kelurahan Cilaja : Selasa, 14 April 2015, pukul 10.45)

Dari pernyataan diatas terlihat jelas bahwa bentuk bantuan yang selama ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kebanyakan berbentuk bantuan dengan sasaran pribadi atau individu, sehingga kebanyakan masyarakat mempunyai pola fikir konsumtif terhadap semua jenis bantuan dari pemerintah, berbeda halnya dengan program bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) walaupun secara ekonomi belum bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat penerimanya tetapi ada sebuah pola fikir baru yang mereka peroleh, tingkat kebersamaan muncul dan rasa tanggung jawab terhadap dana yang diberikan pun ada, jadi secara umum program kelompok usaha bersama (KUBE) merupakan program yang sangat tepat untuk saat ini.

Sementara pendapat lain yang di kemukakan oleh Ibu Ma'ah terkait kebijakan yang dibuat pemerintah yaitu program kelompok usaha bersama (KUBE), adapun yang dikatakan oleh I<sub>5,3</sub> adalah sebagai berikut :

*“menurut ibu sih iya tepat, karena program ini bertujuan memberikan kegiatan usaha dengan pemberian modal sebesar 20 juta rupiah yang diperuntukan untuk membuka usaha, setelah usaha dijalankan oleh ibu dan anggota kelompok yang lain kegiatan usaha ini lumayan membantu perekonomian kami”* (Wawancara dengan Ibu Ma'ah, Ketua KUBE Gunung Nyeklek : Rabu, 06 Maret 2015, pukul 14.01)

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa dengan adanya program usaha yang diberikan oleh pemerintah melalu program kelompok usaha bersama (KUBE) bisa sedikit membantu perekonomian masyarakat penerima bantuannya, Sementara hal yang sedikit berbeda diutarakan oleh I<sub>5,1</sub> dimana menurut beliau sebagai berikut :

*“Menurut saya program ini sebenarnya sesuai kebutuhan masyarakat cuma secara pengolahannya belum maksimal cuma yang menrimanya ini belum faham tentang program ini.”* (Wawancara dengan Bapak Maksum, Ketua KUBE Rukun Mandiri 3 : Kamis, 07 Maret 2015, pukul 15.05)

Dari pernyataan diatas dapat dipastikan program kelompok usaha bersama (KUBE) sebenarnya sesuai kebutuhan masyarakat cuma dalam mengelola kegiatan usahanya masyarakat masih mempunyai kendala,

#### **4.4 Pembahasan Hasil Penelitian**

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah melakukan kegiatan interpretasi hasil penelitian, interpretasi hasil penelitian merupakan penafsiran terhadap hasil akhir dalam melakukan pengujian data dengan teori dan konsep para ahli sehingga bisa mengembangkan teori atau bahkan menemukan teori baru serta mendeskripsikan dari hasil data dan fakta dilapangan. Peneliti dalam hal ini menghubungkan temuan hasil penelitian dilapangan dengan dasar operasional yang telah ditetapkan sejak awal, dalam hal ini adalah teori kriteria evaluasi kebijakan publik yang diperkenalkan oleh *William N. Dunn*.

Ada enam kriteria yang dapat mengevaluasi suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidak dalam proses implementasi atau pelaksanaannya yaitu : kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan responsifitas dan ketepatan. Adapun temuan yang didapatkan dalam penelitian mengenai Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari adalah sebagai berikut :

*Pertama*, pada kriteria yang pertama yaitu efektifitas yang berkaitan dengan pencapaian target program dan hambatan program kelompok usaha bersama (KUBE) dalam pelaksanaannya. temuan dilapangan terlihat bahwa pencapaian tingkat keberhasilan program KUBE belum maksimal karena dalam bidang tertentu seperti aspek sosial dan aspek ekonomi masyarakat penerima bantuan masih belum ada peningkatan sementara dalam hal kelembagaan sedikit ada pencapaian yang cukup memuaskan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan dari program KUBE dalam tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat penerima bantuan



kurang begitu berhasil, temuan lain terkait hal ini yaitu ada sebagian KUBE yang sudah merintis usahanya sejak awal menerima bantuan sampai sekarang belum bisa merasakan keuntungan dari usaha yang mereka geluti ini bisa dilihat dari kelompok KUBE Rukun Mandiri 5 yang bergerak diusaha ternak kambing, sementara hal lain yang peneliti temukan dilapangan terkait masalah ketertiban dalam administrasi yaitu sebagian KUBE yang berusaha dibidang ternak kambing seperti di KUBE Limus Harapan dan KUBE Campurak tidak memiliki bentuk laporan kegiatan yang mendetail, ini menyebabkan segala kegiatan usaha tidak dicatat dengan baik oleh masing-masing kelompok.

Secara umum, hambatan utama dalam program KUBE ini yaitu pemilihan jenis usaha yang digeluti oleh masyarakat penerima bantuan KUBE tidak disesuaikan dengan tujuan awal dari program ini yaitu meningkatkan pendapatan dan penghasilan dari para anggotanya, sehingga masyarakat penerima bantuan tidak mengalami perubahan kondisi secara ekonomi.

*Kedua*, pada kriteria yang kedua yaitu efisiensi yang berkaitan dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan program kelompok usaha bersama. Temuan dilapangan usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang selama ini di Kecamatan Majasari adalah dengan melakukan monitoring dan bimbingan lanjutan serta mengundang *stakeholder* untuk bersinergi, hal lain yaitu memberikan dana stimulan kepada KUBE yang berkembang sehingga dengan upaya ini diharapkan KUBE itu bisa lebih termotivasi dan jauh lebih berkembang lagi.

Selain itu monitoring merupakan upaya nyata yang dilakukan oleh Pendamping KUBE Kecamatan dan Pendamping KUBE Kelurahan untuk memantau para anggota KUBE dalam mengelola jenis usahanya. Sementara upaya dan usaha yang dilakukan oleh kelompok KUBE untuk meningkatkan kegiatan usaha yang dugeluti sudah maksimal, hal ini menunjukkan setiap ketua kelompok ingin memberikan usaha yang terbaik guna terciptanya tujuan utama KUBE yaitu membentuk rasa persatuan kegotong-royongan dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat penerimanya.

*Ketiga*, pada kriteria yang ketiga yaitu kecukupan yang berkaitan dengan tingkat kesesuaian antara dana yang dikeluarkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat penerima bantuan program KUBE di Kecamatan Majasari, temuan dilapangan jumlah dana yang bergulir sudah mencukupi dengan yang dibutuhkan oleh para anggota penerima bantuan program KUBE namun itu tergantung dari jenis usaha yang akan dikembangkan, karena ada sebagian kelompok dengan jenis usaha tertentu memang membutuhkan dana yang besar, seperti jenis usaha ternak ayam dan ternak kambing.

*Keempat*, pada kriteria keempat yaitu perataan yang berkaitan dengan segi perataan manfaat dari program KUBE di Kecamatan Majasari, temuan dilapangan bahwa manfaat dari program usaha melalui KUBE sudah dirasakan merata oleh setiap anggota penerima bantuannya, ini terlihat dari pernyataan semua ketua KUBE yang menyatakan bahwa manfaat yang dirasa membantu perekonomian dan mempunyai banyak manfaat.

*Kelima*, pada kriteria kelima yaitu responsifitas berkaitan dengan interaksi sosial yang terbangun dari adanya program KUBE di masyarakat Kecamatan Majasari. Temuan dilapangan masyarakat menerima dengan sangat senang hati terhadap adanya bantuan program KUBE ini, tingkat kebersamaan antar masyarakat semakin terjalin, sementara hal lain yang menunjukkan adanya masalah kecemburuan sosial pada saat pertama kali program ini turun, masalah kecemburuan sosial yang sempat mencuat pada saat pertama kali program ini diterima oleh masyarakat sempat membuat beberapa masyarakat yang tidak menerima bantuan program merasa dipandang sebelah mata, namun setelah ada tim dari provinsi yang turun langsung ke Kelurahan Pagerbatu dan Kelurahan Cilaja melakukan verifikasi menjadikan masyarakat yang tidak menerima bantuan menyadari bahwa mereka penerima bantuan yang terdata memang layak menerimanya. Masyarakat yang tidak menerima bantuan program masih mengharapkan bisa untuk masuk ke kelompok KUBE, cuma saja dengan keadaan KUBE yang sekarang yang bisa disebut jalan ditempat nampaknya sangat sulit untuk berkembang bahkan sulit untuk merekrut anggota-anggota baru.

*Keenam*, pada kriteria keenam yaitu ketepatan yang berkaitan dengan apakah kebijakan dengan mengeluarkan program tersebut sudah memberikan kontribusi yang baik bagi peningkatan taraf hidup masyarakat Kecamatan Majsari khususnya Kelurahan Cilaja dan Kelurahan Pagerbatu. Temuan dilapangan program kelompok usaha bersama (KUBE) yang digulirkan pemerintah sejak tahun 2006 sampai dengan

sekarang merupakan suatu kebijakan yang tepat, karena dari segi tujuan utamanya yaitu pembentukan kelompok dimana dana yang bergulir dan diberikan ke kelompok harus dikelola sesuai jenis kegiatan usaha yang dipilih oleh masing-masing kelompok, ini menunjukkan bahwa dengan adanya program ini maka pemerintah memberi jalan supaya masyarakat yang menerima bantuan bisa lebih hidup mandiri tanpa ketergantungan dengan program-program pemerintah yang sifatnya diberikan kepada individu. bentuk bantuan yang selama ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kebanyakan berbentuk bantuan dengan sasaran pribadi atau individu, sehingga kebanyakan masyarakat mempunyai pola pikir konsumtif terhadap semua jenis bantuan dari pemerintah, berbeda halnya dengan program bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) walaupun secara ekonomi belum bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat penerimanya tetapi ada sebuah pola pikir baru yang mereka peroleh, tingkat kebersamaan muncul dan rasa tanggung jawab terhadap dana yang diberikan pun ada, jadi secara umum program kelompok usaha bersama (KUBE) merupakan program yang sangat tepat untuk saat ini.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa implementasi dari program kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari belum terlaksana secara maksimal. Berikut gambaran pembahasan penelitian yang telah dilakukan dengan 6 (enam) kriteria evaluasi menurut Dunn dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.4

## PEMBAHASAN DAN TEMUAN DI LAPANGAN

NO	Kriteria	Pembahasan	Temuan di Lapangan
1	Efektifitas	Pencapaian target pelaksanaan program KUBE dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat penerima bantuan program	pencapaian tingkat keberhasilan program KUBE belum maksimal karena dalam bidang tertentu seperti aspek sosial dan aspek ekonomi masyarakat penerima bantuan masih belum ada peningkatan, ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan dari program KUBE dalam tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat penerima bantuan kurang begitu berhasil,
2	Efisiensi	Usaha yang dilakukan untuk mengembangkan program KUBE	usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang selama ini di Kecamatan Majasari adalah dengan melakukan monitoring dan bimbingan lanjutan serta mengundang <i>stakeholder</i> untuk bersinergi, hal lain yaitu memberikan dana stimulan kepada KUBE yang berkembang sehingga dengan upaya ini diharapkan KUBE itu bisa lebih termotivasi dan jauh lebih berkembang lagi. Selain itu monitoring merupakan upaya nyata yang dilakukan oleh Pendamping KUBE Kecamatan dan Pendamping KUBE Kelurahan untuk memantau para anggota KUBE dalam mengelola jenis usahanya.
3	Kecukupan	Kesesuaian jumlah dana yang diberikan pemerintah untuk	tingkat kesesuaian antara dana yang dikeluarkan pemerintah dengan

		memenuhi kebutuhan penerima bantuan program KUBE	kebutuhan masyarakat penerima bantuan program KUBE di Kecamatan Majasari, temuan dilapangan jumlah dana yang bergulir sudah mencukupi dengan yang dibutuhkan oleh para anggota penerima bantuan program KUBE.
4	Perataan	Distribusi manfaat yang dirasakan oleh penerima bantuan program KUBE	manfaat dari program usaha melalui KUBE sudah dirasakan merata oleh setiap anggota penerima bantuannya, ini terlihat dari pernyataan semua ketua KUBE yang menyatakan bahwa manfaat yang dirasa membantu perekonomian dan mempunyai banyak manfaat.
5	Responsifitas	Interaksi sosial dari masyarakat yang menerima bantuan program KUBE terhadap masyarakat yang tidak menerima bantuan	masyarakat menerima dengan sangat senang hati terhadap adanya bantuan program KUBE ini, sementara hal lain yang menunjukkan adanya masalah kecemburuan sosial pada saat pertama kali program ini turun, masalah kecemburuan sosial yang sempat mencuat pada saat pertama kali program ini diterima oleh masyarakat sempat membuat beberapa masyarakat yang tidak menerima bantuan program merasa dipandang sebelah mata, namun setelah ada tim dari provinsi yang turun langsung ke Kelurahan Pagerbatu dan Kelurahan Cilaja melakukan verifikasi menjadikan masyarakat yang tidak menerima bantuan menyadari bahwa mereka penerima bantuan yang terdata memang layak menerimanya.

6	Ketepatan	Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui program KUBE sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini	Program kelompok usaha bersama (KUBE) yang digulirkan pemerintah sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang merupakan suatu kebijakan yang tepat, karena dari segi tujuan utamanya yaitu pembentukan kelompok dimana dana yang bergulir dan diberikan ke kelompok harus dikelola sesuai jenis kegiatan usaha yang dipilih oleh masing-masing kelompok, ini menunjukkan bahwa dengan adanya program ini maka pemerintah memberi jalan supaya masyarakat yang menerima bantuan bisa lebih hidup mandiri tanpa ketergantungan dengan program-program pemerintah yang sifatnya diberikan kepada individu.
---	-----------	--	--

*Sumber : Peneliti 2017*

Tabel 4.5 menunjukkan hasil dan temuan dilapangan dalam penelitian evaluasi kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian mengenai Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari, maka berdasarkan teori kriteria evaluasi kebijakan publik menurut *Dunn* dapat ditarik kesimpulan melalui 6 (enam) kriteria yang dapat mengevaluasi suatu implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidak.

Berdasarkan tujuan yang terdapat pada latar belakang tentang mengevaluasi implementasi program kelompok usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pencapaian tingkat keberhasilan program KUBE belum maksimal karena dalam bidang tertentu seperti aspek sosial dan aspek ekonomi masyarakat penerima bantuan masih belum ada peningkatan.
2. Usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang selama ini di Kecamatan Majasari adalah dengan melakukan monitoring dan bimbingan lanjutan serta mengundang *stakeholder* untuk bersinergi, namun hal lain yang sampai sekarang belum dilakukan yaitu memberikan dana stimulan kepada KUBE yang berkembang padahal dengan upaya ini diharapkan KUBE itu bisa lebih termotivasi dan jauh lebih berkembang lagi.



3. Tingkat kesesuaian antara dana yang dikeluarkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat penerima bantuan program KUBE di Kecamatan Majasari, temuan dilapangan jumlah dana yang bergulir sudah mencukupi dengan yang dibutuhkan oleh para anggota penerima bantuan program KUBE.
4. Manfaat dari program usaha melalui KUBE sudah dirasakan merata oleh setiap anggota penerima bantuannya, ini terlihat dari pernyataan semua ketua KUBE yang menyatakan bahwa manfaat yang dirasa membantu perekonomian dan mempunyai banyak manfaat.
5. Masyarakat menerima dengan sangat senang hati terhadap adanya bantuan program KUBE ini, walaupun pada awal pemberian bantuan program sempat terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat yang tidak menerima bantuan.
6. Program kelompok usaha bersama (KUBE) yang digulirkan pemerintah sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang merupakan suatu kebijakan yang tepat, ini menunjukkan bahwa dengan adanya program ini maka pemerintah memberi jalan supaya masyarakat yang menerima bantuan bisa lebih hidup mandiri tanpa ketergantungan dengan program-program pemerintah yang sifatnya diberikan kepada individu.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari” ini, maka peneliti dapat memberikan saran agar dapat melaksanakan atau mengimplementasikan program tersebut berjalan dengan semestinya. Adapun saran-saran tersebut yaitu :

1. Pendampingan terhadap KUBE perlu ditingkatkan dan dikembangkan seperti dengan cara mengadakan pertemuan dan pelatihan keterampilan pengelolaan usaha, hal ini guna meningkatkan keterampilan para anggota dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan sarasannya secara luas.
2. Diadakannya monitoring oleh pendamping KUBE yang rutin setiap bulan sehingga dapat memotivasi anggota untuk dapat lebih baik.
3. Pemilihan jenis usaha yang akan digeluti seharusnya mengikuti perkembangan perekonomian di daerah Kecamatan Majasari, seperti dengan mengamati dan mencermati kegiatan pasar di daerah Pandeglang, anggota harus jeli melihat peluang usaha yang saat ini sangat diminati oleh pasar, sehingga usaha yang digeluti saat ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan tidak hanya terpaku pada pertimbangan kearifan lokal yang ada.
4. Pemberian dana stimulan yang dijanjikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang hendaknya segera dilakukan dengan cara mentransfer langsung ke rekening para anggota KUBE yang berada di Wilayah Kecamatan Majasari, karena dengan pemberian dana stimulan kepada KUBE yang berkembang membuat KUBE itu bisa lebih termotivasi dan jauh lebih berkembang lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Teks

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta.

Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Dwidjowidjoto, R. Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : DIA FISIP Universitas Indonesia.

Islamy, Irfan. MPA. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Moloeng, J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.

Miles & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

- Miles, Matthew dan Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru)*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Parson, Wayne 2008. *Public Policy Pengantar Teori, dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung :Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Widya Wicaksono, Kristian. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.

## Dokumen

Buku Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

## Website

Kementrian Sosial Republik Indonesia. (tanpa tahun). *Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)*. Melalui, <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=23> [ Diakses pada : senin 22 Desember 2014, 17.00]

Rafkha. 2014. *Entaskan Kemiskinan , Kemensos Gulirkan Program KUBE dan UEP*. Melalui, < <http://www.aktual.co/sosial/154957entaskan-kemiskinan-kemensos-gulirkan-program-kube-dan-uep>> [Diakses pada : Selasa 12/01/2015 16.00]

Utami, Dewi. (tanpa Tahun). *KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Sebagai Model Untuk Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat*. Melalui, <<http://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/07/27/kube-kelompok-usaha-bersama-sebagai-model-untuk-pengembangan-pemberdayaan-masyarakat/>> [Diakses pada : Kamis 03/12/2014 09.00]













